

**KEDUDUKAN PETANI PENGGARAP
DALAM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI OLEH NEGARA
(Studi Kasus Penguasaan Tanah di Kawasan Penyangga Taman Nasional
Kerinci Seblat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci- Jambi)**



TESIS

**Disusun Dalam rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

Disusun Oleh

**ASWANTO, SH
Nim B4B.OO2060**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

**KEDUDUKAN PETANI PENGGARAP
DALAM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI OLEH NEGARA
(Studi Kasus Penguasaan Tanah di Kawasan Penyangga Taman Nasional
Kerinci Seblat Dikecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Jambi)**

Disusun oleh :

**ASWANTO, SH
B4B 002.060**

Menyetujui :

Pembimbing


Hj. Endang Sri santi, SH.M.H

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**


Prof. I.G.N Sugangga, SH

Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan di lembaga pendidikan lainnya

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/ tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2004

(ASWANTO, SH)

“ The position of worker farmers in Possessing right Perspective by Government”

(In case : Land possessed of Kerinci Seblat National Park in District of Gunung Raya, Kerinci Regency, Jambi)

This observation examine the position of worker farmers according to Forestry Law No.41/1999 and implement regulation by government No.34/2002 about Forestry system and organizing Forestry, Forest execution planning, Forest usefulness and using Forest area toward farmer conservation forest, that have been cultivated for years and descendingly. And then both are looked by government right. Powered isn't meant having, but it means giving a right. In common explanation II (2) UUPA, stated that government power right about owned land, limited its content, mean while about unowned land is wider and full. It means that the country can give that land to someone or legal body with a right according to its aims and needs to the institution (department, board, specific area) to be used for each implementation.

The purpose for this observation is that there is important to keep balancing of natural resources by maintaining the function of forest, beside that the society around the forest that have been worked or worker farmers for years and descendingly can't be neglected.

The using method of thesis observation is empire juridical, means that studying law used in society. The specification of the research is descriptive, correcting datum is done by browsing / observation and interviewing certain population and using random sampling. Analytical data using is analitical qualitative technic.

In this observation, writer saw, looked that land status of ex-Kerinci Seblat National Park in District of Gunung Raya, Kerinci Regency, Province Jambi is Social Participation System Production (HP3M) possessing forest area by worker farmers is done by agreement from its leaders which everybody ought to pay yearly custom payment on Kenduri sko event (Kenduri adat) . Beside that, the prosperity of people surrounding forest (worker farmers) can be reached because of participation of them on social forest program.

So, participation of government (in this case Department of Forestry) in overcoming problem of possessing land have taken attention on people importance around forest and give guidance and socialization about land status to society so that those will know what status of land they worked.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah kedudukan petani penggarap berdasarkan Undang-undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan terhadap tanah yang merupakan eks hutan lindung, yang telah digarap selama bertahun-tahun dan turun termurun. Kemudian keduanya ditinjau dari hak menguasai negara. Dikuasai bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang. Dalam Penjelasan Umum II (2) UUPA menyebutkan bahwa hak kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak, dibatasi oleh isi dari hak itu, sedangkan terhadap tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak adalah lebih luas dan penuh. Dengan demikian maka negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan-badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukannya dan keperluannya kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan, daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan bahwa perlunya menjaga keseimbangan sumber daya alam dengan mempertahankan hutan dengan fungsinya, di samping itu bahwa kehidupan masyarakat sekitar hutan yang telah bekerja sebagai petani penggarap selama bertahun-tahun dan secara turun temurun tidak dapat diabaikan begitu saja.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Yuridis empiris, yaitu mempelajari hukum diterapkan dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan/observasi dan wawancara/interview, penentuan populasi dan sampel menggunakan random sampling. Teknik analitis data yang digunakan teknik analisis kualitatif.

Dalam hasil penelitian tesis ini penulis melihat, mengamati bahwa status tanah eks Taman Nasional Kerinci Seblat dikecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi adalah hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M) penguasaan tanah kawasan hutan yang dilakukan oleh petani penggarap tersebut dilakukan atas persetujuan tokoh-tokoh adat setempat yang mana masyarakat diwajibkan membayar iuran adat yang dibayar setiap tahunnya pada acara kenduri sko (kenduri adat).

Oleh karena itu peranan pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehutanan) dalam menyelesaikan sengketa penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat disekitar hutan serta memberi penyuluhan dan disosialisasikan tentang status tanah tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui status lahan yang digarapnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya juaalah penulis telah dapat menyelesaikan ppenulisan teisi ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penulisan ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi mahasiswa yang akan m,enyelesaikan program studi Magister Kenotariatan S-2 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Didalam penyusunan tesis ini. Penulis menyadari dengan sepenuh hati akan kurang sempurnanya tulisan ini, mengingat tingkat kemampuan serta pengalaman penulis yang sangat terbatas. Namun demikian penulis telah berusaha keras untuk menyusunnya agar tesis ini tersusun dengan baik

Terlaksananya penulisan tesis ini melalui proses yang cukup panjang dan kerja keras yang disertai dengan dukungan, bimbingan dan petunjuk, dorongan moril dan materil dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan mohon kepada Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada :

1. Bapak H. Achmad Busro, SH, MHum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang .
2. Bapak Prof. IGN Sugangga ; SH. Selaku Ketua Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak R Suharto, S.H, MHum Selaku Sekretaris Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Ibu Hj. Endang Srisanti, SH, MH. Sebagai dosen Pembimbing Utama yang mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran, ketelitian serta telah memotivasi penulis sehingga selesainya Tesis ini
5. Bapak Sukirno SH, MSi. Yang turut memberikan saran dan kritikan dalam penulisan Tesis ini.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-ibu dosen pada studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf Pengajaran pada studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
8. Bapak Ir Kholid Indarto sebagai Kepala Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (BTNKS) serta staf keputakaan TNKS di Sungai Penuh Kerinci
9. Bapak Ir Heru Prasetyanto Selaku Kepala Beserta Staf Kantor Kehutanan Dan Konservasi Tanah Kabupaten Kerinci yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesisi ini
10. Ibu Dra Linda Martiani beserta Staf selaku Camat Kecamatan Gunung Raya Kabupaten kerinci
11. Bapak Drs Saktian Selaku Sekretaris Camat Kecamatan Gunung Raya yang membantu penulis dalam pengambilan data-data untuk penulisan tesis ini
12. Bapak-bapak lembaga Kerapatan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci yang telah banyak memberi masukan-masukan dalam penulisan tesis ini
13. Yang teristimewa buat Kedua Orang tuaku H. Ismet Paguh dan Hj Jawanis yang telah memberi doa restu, motivasi, membimbing penulis dengan penuh

kasih sayang serta jerih payahnya membiayai kuliah hingga penulis menyelesaikan tesis ini.

14. Kakak-kakakku Nopalyon. SPd, Ardi Ismet Amd, Andi Ismet serta Adikku Intan Kurnia Sari yang telah banyak membantu penulis baik moril maupun materil hingga penulis menyelesaikan penulisan tesis ini
15. Sahabat serta kakakku Iwan partono, Syarif Adnan, Sri Handaka Purnama, Monique Sri Uktari, Yuli, Indah Ariastuti, Yohanes Yabes Luh Putu Darmayanti, Hery, Tormenset Parlindungan, M.Hilal, M.Henalton, Teguh Prastyo, Wiwin, Lukito, Jefri dan Brahmo yang telah banyak memberi masukan, bantuan dan telah menemani penulis baik suka dan duka serta dorongan hingga penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
16. Teman-teman kos: Yusron, Bang Rahman, Kak Budi, Kak On, Kak Pakri yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesisi ini
17. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan guna kesempurnaan tesis ini.

Semarang, Agustus 2004

ASWANTO, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAM PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	12
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 14
2.1 Pengertian-pengertian	14
2.3. Hak Atas Tanah Dalam UUPA	21
2.4 Hak Penguasaan atas tanah.....	21
2.5 Landasan Pengaturan	22
2.5.1. Pancasila Sebagai Landasan Filosofi.....	22
2.5.2 Landasan Konstitusional	26
2.5.3 Landasan Operasional	27
2.5.3.1 Menurut Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria	 27

2.5.3.2 Menurut Undang-Undang No 41 tahun 1999	
tentang Kehutanan	32
2.6 Asas-Asas Hak Penguasaan Atas Tanah	35
2.7 Macam-Macam Hak Penguasaan Atas Tanah	37
2.8 Dasar Hukum dan Asas Pengelolaan Kawasan Hutan	39
2.9 Kewenangan Pengelola Kawasan Hutan	48
2.10 Aspek-Aspek Pengelolaan Hutan	51
III. METODE PENELITIAN	57
3.1 Metode Penelitian	57
3.2 Metode Pendekatan	58
3.3 Spesifikasi	59
3.4 Penentuan Populasi dan Sampel	59
3.5 Teknik Pengumpulan Data	60
3.6 Analisa Data	63
3.8 Sistematika Penulisan	63
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Hasil Penelitian	65
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Gunung Raya	65
4.1.2 Taman Nasional Kerinci Seblat	67
4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi Petani Penggarap	72

4.2 Pembahasan	76
4.2.1 Kepastian dan Perlindungan Hukum Petani Penggarap	78
4.2.2 Status Hak Atas Bagi Hak Garap.....	80
4.13. Prosedur yang ditempuh dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan	84
4.2.5 Status hukum tanah eks Taman Nasional Kerinci Seblat yang telah digarap oleh masyarakat di Kecamatan Gunung Raya	86
4.2.6 Dasar Penguasaan Atas Tanah oleh Petani Penggarap terhadap tanah garapannya	94
4.2.7 Prosedur Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Penguasaan Atas Tanah Negara oleh Petani Penggarap di Kecamatan Gunung Raya	102
 V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran-saran	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Penggunaan Tanah Di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Penyebaran di Desa-Desa Kecamatan Gunung Raya

Tabel 3. Mata Pencarian Penduduk di Kecamatan Gunung Raya

Tabel 4. Cara Perolehan Tanah oleh Petani Penggarap di Kecamatan Gunung Raya

Tabel 5. Tanggapan Responden Terhadap Lahan Yang Mereka Garap

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Persoalan di bidang agraria dewasa ini merupakan suatu persoalan yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan peka dan sensitifnya masalah pertanahan. Dalam kehidupan bermasyarakat masalah pertanahan tidak hanya sekedar menyangkut aspek ekonomis dan kesejahteraan semata akan tetapi mempunyai kaitan yang erat sekali dengan masalah sosial, politis yuridis, psikologis, kultural dan religius.

Pengertian dan istilah agraria menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat (1) meliputi bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya sedangkan tanah dalam pengertian yuridis menurut Pasal 1 ayat (4) *junto* Pasal 4 ayat (1) adalah bagian terluar dari bumi atau kulit bumi yang diatasnya dapat diberikan hak-hak atas tanah bagi perorangan maupun badan hukum

Tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia terutama dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak

terpisahkan bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhanan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis semata tetapi bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat dan penghormatan terhadap hak perorangan¹

Hubungan antara manusia dengan tanah yang menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan dengan tetap meletakkan penghormatan terhadap hal-hak perorangan ini juga menjadi visi dan misi yang dicanangkan oleh pemerintah dalam program Pembangunan Nasional Tahun 2000 (Propenas)

Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 yang disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan operasional GBHN 1999-2004 disebutkan bahwa pembangunan nasional adalah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas, mewujudkan tujuan nasional yang termaktup dalam Pembukaan UUD 1945 Yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Apabila dihubungkan dengan Pertanahan maka dalam Propenas 2000

¹ Maria S.W.Sunardjono.*kebijakan pertanahan Antar Regulasi dan Implementasi*, Kompas Jakarta 2001,hal 158

² *Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004*.sinar grafika. Jakarta hlm 10

di bidang pertanahan menyebutkan bahwa pembangunan bidang pengelolaan pertanahan diarahkan pada terwujudnya kebijaksanaan penggunaan tanah, penguasaan tanah yang adil dan terselenggaranya pelayanan administrasi pertanahan yang tertib dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dan masyarakat

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (sesuai dengan amandemen IV) disebutkan bahwa:

Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Hal ini menggambarkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung didalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat yang oleh karenanya dikuasai oleh negara sehingga pemanfaatannya dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³

Hak-hak perseorangan yang dibatasi oleh Negara sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Peraturan tersebut mengakhiri sifat dualisme hukum pertanahan yang pernah berlaku di Indonesia.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa:

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada, dan dimiliki oleh

³ Laporan Penelitian Tentang Aspek Hukum Penguasaan Tanah Oleh Negara (penerapan UUPA dalam praktek), oleh Tim 9 Dibawah Pimpinan Moh. Hasan Wargakusumah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1997/1998, hlm m18

orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Hal ini berarti bahwa pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (2) jo ayat (4) lebih luas dari pada yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). bahwa yang dimaksud sebagai tanah adalah permukaan bumi dan tidak termasuk tubuh bumi yang dibawahnya sebagai satu kesatuan tanah, air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia yang merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa

Hak menguasai dari Negara lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat

(2) Undang-Undang Pokok Agraria bahwa:

Hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Dalam kaitannya dengan kehutanan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, Negara sebagai organisasi tertinggi dari seluruh rakyat Indonesia, memberi tugas dan wewenanganya kepada departemen/instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Berdasarkan tugas tersebut maka dibuatlah suatu ketentuan peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai hutan yakni Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 1967 yang kemudian diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 dan dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut menunjuk bahwa menteri yang disertai tugas dan pertanggung jawaban adalah menteri di bidang kehutanan (Departemen Kehutanan).

Mengenai Hak Menguasai Negara atas hutan dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa :

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemudian luasnya wewenang Negara atas hutan disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 bahwa :

Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenang dalam bidang hukum publik. Pengertian ini mengandung makna yang sama dengan pengertian menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Penjelasan Umum 11 (2) bahwa pengertian dikuasai menurut Pasal 2 ayat (1) bukan berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi tertinggi mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaannya, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi,air dan ruang angkasa.

Hal tersebut diatas tentunya sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara bukan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan serta mengatur dan hukum antara orang dengan hutan dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Pada tahun 1982, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan salah satu taman nasional⁴ yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982 dan ditetapkan secara resmi sebagai taman nasional pada tahun 1992 berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 1049/Kpts-II/1992, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir Surat Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-II/1999.

Dalam teknis pelaksanaannya, Pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehutanan) menyerahkan tugas dan kewenangan pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat Kepada Balai Taman Nasional Kerinci Seblat yang berada dan bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal Perlindungan dan

⁴ Taman nasional menurut Pasal 1 angka 13 Keputusan Presiden RI nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung

Konservasi Alam yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 901/Kpts-II/1999

Balai Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan unit pelaksanaan teknis dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang diberi tugas melaksanakan Pengelolaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan diwilayah kerjanya. Wilayah kerjanya meliputi 9 (sembilan) kabupaten dan satu Pemerintah kota di empat propinsi Pulau Sumatera yaitu Propinsi Jambi. Sumatera Barat. Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan ketentuan diatas maka Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (BTNKS) sebagai pengelola kawasan hutan berwenang untuk memelihara, mengelola dan mengatur kawasan tersebut, agar dapat memberikan *invest* kepada negara dalam mencapai tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat secara adil merata.

Pengelolaan hutan demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berada pada pemerinah pusat. Dalam pelaksanaanya. Pemerintah pusat dapat menyerahkan kepada pemerintah daerah, seperti yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang kehutanan nomor 41 Tahun 1999 bahwa :

- 1) Dalam rangka penyelenggarakan Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah
- 2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah

Penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu perwujudan dan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dikehendaki Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Bahwa :

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional ;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari ;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai ;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Disamping itu, penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan yang harus berdasarkan asas dan tujuannya yang manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan keterbukaan dan keterpaduan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999

Dalam kaitannya dengan asas hukum *lex specialis derogat legi*

generalis maka timbulnya hak/wewenang untuk mengelola hutan pada Departemen Kehutanan selain karena didasarkan adanya hak menguasai oleh negara atas semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan, juga dilandaskan pada hak menguasai oleh Negara menurut Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) yang merupakan ketentuan dasar atau landasan bagi semua peraturan yang mengatur mengenai tanah dalam hal peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya. Jadi sifat pemberian hak atau wewenang didalam mengelola hutan yang ada pada Departemen Kehutanan ini didasarkan pada hubungan yang secara hirarkhis antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dengan Undang-Undang Kehutanan dimana Undang-Undang Pokok Agraria ini sebagai payung dalam mengatur penggunaan , peruntukan, pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA

Adanya sifat pemberian hak atau wewenang didalam mengelola suatu sumber daya alam tidak jarang menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu antar instansi, maupun antara instansi dengan masyarakat

Salah satu contoh tipe sengketa dalam permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan tesis ini adalah Konflik tata batas Taman Nasional Kerinci Seblat dengan tanah masyarakat sekitar taman nasional dalam tesis ini penulis sebut dengan istilah petani penggarap.

Permasalahan timbul ketika melaksanakan tata batas Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang mana lahan penggarap dimasukkan sebagai bagian dari TNKS, sedangkan masyarakat dalam hal ini penggarap telah mengusahakan sendiri secara aktif selama bertahun-tahun lahan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidupnya

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Pasal 8 ayat (4) bahwa :

Penggarap adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya

Selain atas dasar tersebut diatas menurut Pasal 67 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya

Selain atas dasar tersebut adanya beberapa ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakian Tanah Tanpa ijin Yang Berhak atau Kuasanya, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-Undang Darurat No. 8/1945 jo Undang-Undang Darurat No 1/1956 tersebut, selanjutnya menurut ketentuan-ketentuan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian.
2. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 1 pasal

- ini maka Menteri Agraria dengan Menteri Pertanian, dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang mulai berlaku sejak tanggal 12 Juni 1954
3. Didalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu Menteri Agraria dan instansi yang ditunjukannya mempunyai wewenang pula sebagai yang dimaksud dalam pasal 4
 4. Didalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya didaerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya, dengan ketentuan, bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Kecamatan Gunung Raya merupakan salah satu daerah yang berada dikabupaten kerinci, dimana daerah ini sebagian besar wilayahnya merupakan TNKS sedangkan disisi lain penduduk di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci pada umumnya bermata pencaharian petani penggarap. Berdasar uraian tersebut diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul:

KEDUDUKAN PETANI PENGGARAP DALAM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI OLEH NEGARA

(Studi kasus Penguasaan Tanah di Kawasan PenyanggaTaman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kecamatan Gunung Raya kabupaten Kerinci – Jambi)

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, ada 3 (tiga) permasalahan yang peneliti ungkap adalah :

1. Bagaimana status hukum lahan yang merupakan eks Taman Nasional yang sekarang menjadi lahan pertanian rakyat berdasarkan undang-undang yang berlaku ?

2. Apa dasar penguasaan hak atas tanah oleh petani penggarap terhadap tanah garapannya ?
3. Prosedur apa yang ditempuh dalam penyelesaian masalah penguasaan tanah dalam kawasan Taman Nasional di Kecamatan Gunung Raya ?

I.3. Maksud dan tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan di bidang hukum agraria khususnya dibidang kehutanan.

Adapun tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui status hukum eks Taman Nasional tersebut (yang sekarang lahan pertanian) beserta hak-hak yang ada diatasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dasar penguasaan tanah garapan oleh petani penggarap.
3. Untuk mengetahui prosedur yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah penguasaan tanah di Kecamatan Gunung Raya.

I.4. kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber informasi dan menambah wawasan dibidang hukum agraria khususnya yang berkaitan dengan hukum kehutanan.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi masyarakat maupun para praktisi dalam menyelesaikan kasus pertanahan di kawasan hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian-pengertian

a. Pengertian Petani dan Pengarap

Istilah petani menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 huruf e adalah :

Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencarian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Sementara istilah Penggarap menurut Undang-Undang Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Pasal 8 ayat (4) adalah :

Penggarap dimaksudkan sebagai petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya.

Yang dimaksud dengan memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan dengan tidak mempersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Mengenai hak garap, hak garap merupakan salah satu hak adat yang berhubungan dengan tanah yang diakui dalam hukum adat. Dalam eksistensinya hak-hak adat ini diakui dalam hukum nasional yang mengatur mengenai tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, dengan persyaratan sepanjang hak-hak itu masih ada dengan memperhatikan tanda-tanda, sifat dan ciri-ciri

hak adat yang masih berlaku. Pengakuan hukum adat sebagai dasar atau asas UUPA sebagaimana dikemukakan dalam konsideran atau berpendapat UUPA bahwa perlu adanya hukum Agraria Nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah. Disamping itu dalam Pasal 5 UUPA adanya pernyataan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat. Sama pula halnya dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Hak garap merupakan suatu perjanjian antara pemilik dengan petani (penggarap) didalam mengerjakan/mengelola/mempergunakan suatu lahan. Dengan adanya hak garap tersebut maka petani penggarap secara sah mengerjakan/mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya dengan memikul seluruh/sebagian dari resiko produksinya. Penggarapan ini biasanya dilakukan secara turun temurun dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh petani penggarap kepada pemilik lahan.

b. Pengertian hutan, Kawasan Hutan dan Taman Nasional

Istilah hutan pertama kali berasal dari bahasa Belanda "bos". Dalam bahasa Inggris disebut "forrest" Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan seperti pariwisata⁵

⁵ Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 34

Menurut Dengler yang diartikan sebagai hutan adalah :⁶

Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembabaan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukupnya rapat (horizontal dan vertikal)

Beberapa literatur, salah satunya adalah buku penyuluhan kehutanan I yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan, hutan didifenisikan sebagai suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan berbunyi :

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ekosistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari tumbuhan dan hewan bersama habitatnya/lingkungannya yang saling berintegrasi. Dari pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa difenisi hutan yang dimaksud diatas adalah hamparan lahan dimana hidup diatasnya tumbuhan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah beserta segala isinya (sumber daya alam yang terkandung didalamnya) termasuk hewan. Hamparan lahan seperti disebut diatas oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun hamparan lahan sebagai

⁶ Ibid. Hal. 34

tempat hidup, bergantung dan keberadaan sumber daya alam hayati oleh Undang-undang Kehutanan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dijelaskan bahwa luasnya hamparan lahan sehingga dapat dijadikan kawasan hutan adalah minimum $\frac{1}{4}$ ha (seperempat hektar). Dalam penjelasan undang-undang tersebut dikatakan bahwa dengan luas hamparan tersebut hutan sudah dapat mencapai suatu keseimbangan persekutuan hidup yang diperlukan, sehingga mampu memberikan manfaat-manfaat produksi, perlindungan, pengaturan air, pengaturan terhadap iklim dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Kehutanan (UUK), hutan dibagi atas 2 (dua) yakni hutan negara dan hutan hak. Yang dimaksud dengan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam penjelasan umum UUK dijelaskan bahwa yang dimaksud dibebani hak atas tanah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai. Menurut Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah :

Wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dalam penjelasan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 164/Kpts-II/1994 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa

Kawasan hutan adalah Wilayah-wilayah tertentu yang oleh menteri kehutanan telah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.

Kedua difenisi tersebut diatas dimaksudkan bahwa pemerintah berdasarkan pendelegasian dari negara mempunyai wewenang untuk menunjuk sekaligus menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan dengan memperhatikan karakteristik wilayah berdasarkan rencana penataan ruang setiap wilayah. Tujuan adalah untuk mencapai suatu keseimbangan baik segi ekologi, sosial maupun perekonomiannya.

Untuk itu didalam penyelenggaraan dan pengelolaan hutan harus berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Semuanya ini bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seluruhnya.

Adapun pengertian dari Taman nasional menurut Pasal 1 angka 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan adalah Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.

c: Pengertian Hak

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan ini dilakukan dalam rangka menjaga kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa sebut sebagai hak, melainkan

hanya kekuasaan tertentu saja yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap sesuatu benda maupun orang sehingga diantaranya menimbulkan hukum⁷

Hak merupakan pengalokasian kekuasaan untuk bertindak dalam melaksanakan kepentingan yang mendapat perlindungan hukum. Penggunaan hak ini menghasilkan suatu keadaan yang berkaitan langsung dengan pemilik hak.

Salah Satu definisi Hak yang dikemukakan oleh Allen adalah⁸

"The legally guaranteed power to realize an interest" :

Implikasi dari definisi tentang hak diatas antara lain:

- a. hak adalah suatu kekuasaan (*power*) yaitu kemampuan untuk memodifikasi keadaan (*a state of affairs*)
- b. hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum yaitu eksistensinya diakui oleh hukum dan penggunaannya didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal yang dapat diterima beserta segala konsekwensinya
- c. penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan (*a state of affairs*) yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak

Istilah "hak" menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan)

Satjipto Raharjo memandang hak adalah kekuasaan yang diberikan

⁷ Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Candra Pratama, Jakarta, 1996, hlm 242

oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Hak tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut⁹

Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Disamping itu hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak¹⁰

d. Pengertian Tanah

Tanah menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Sementara menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang dikenal dengan UUPA), bahwa yang dimaksud dengan tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, tidak meliputi tubuh bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Menurut Prof Budi Harsono jika penggunaan tanah hanya terbatas pada permukaan bumi saja maka hal tersebut tidak ada maknanya. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya. Oleh karena itu dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan, bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan

⁹ Of cit, hlm 243

¹⁰ Satjipto Raharjo, Op. cit, hlm 54

air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.

2.3 Hak Atas Tanah Dalam UUPA

Apabila di atas permukaan bumi diletakkan sesuatu hak yang disebut hak atas tanah, maka itu berarti hak tersebut meliputi sebagian dari permukaan bumi sesuai dengan hak atas tanah tersebut. Oleh karena pada pemakaiannya tidak mungkin hanya permukaan bumi saja, maka hak atas tanah bukan saja memberi wewenang untuk memakai tanah yang dihaki, tetapi kewenangan pemakaian itu meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya serta sebagian ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan tanah yang dihaki. (sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 4 di atas ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu :

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak guna Bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka hutan
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hal-hal lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

2.4 Hak Penguasaan Atas Tanah

Hak merupakan pengalokasian kekuasaan untuk bertindak dalam

melaksanakan kepentingan-kepentingan yang mendapat perlindungan hukum. Penggunaan hak ini menghasilkan suatu keadaan yang berkaitan langsung dengan pemilik hak.

Sifat hak menguasai oleh negara terhadap hak-hak lainnya atas tanah beserta isinya dapat disepadankan dengan hak ulayat persekutuan hukum adat terhadap hak-hak perseorangan atas tanah dimana hak ulayat sebagai dasar dan asal dari hak perseorangan sebagaimana digambarkan oleh Moh. Kosnoe sebagai berikut:¹¹

“Antara hak ulayat dari masyarakat hukum dengan hak perseorangan atas tanah terlihat sebagai suatu wadah dengan isinya. Isinya akan tampak penuh bilamana hubungan orang dengan tanahnya itu intensif. Akan tetapi terlihat dasar wadah itu bilamana isi itu menjadi kurang atau kosong. Dalam hal ini akan terlihat ada hubungan bahwa hak ulayat terdesak oleh hak perseorangan; yang ada ialah hak perseorangan atas bilamana intensif dilaksanakan menutup dasar itu tidak menampakan campur tangannya “

Sesuai dengan sifat hak menguasai, maka Negara melalui pemerintah sebagai badan penguasa bebas melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tanah baik yang bersifat mengatur penggunaan maupun peruntukannya. Pemerintah dalam hal ini juga dapat melimpahkan kekuasaannya kepada organ dibawahnya maupun dengan bantuan pelaksanaan melalui aparat pemerintah berdasarkan atas tujuan pembantuannya.

2.5 Landasan Pengaturan

2.5.1. Pancasila Sebagai Landasan Filosofi

Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak

¹¹ Moh.Kosnoe, Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Ini, Airlangga Unoversity Press. Surabaya, 1979, hlm 157

terpisahkan, bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis semata tetapi bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempoat penghormatan terhadap perseorangan.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup, dapat dicapai jika didasarkan atas keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik, dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan penciptanya.

Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan pengejawatahan dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan pengejawatahan dari sila-sila yang terdapat dalam pancasila.

Pedoman yang diambil dari sila **ke-Tuhanan Yang Maha Esa** dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria bahwa :

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Pasal ini menjelaskan bahwa sebagai suatu bangsa yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia mengakui bahwa bumi, air dan

ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya diwilayah Republik Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Karunia Tuhan ini tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menerimanya, hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai sifat kodrat dan karena itu bersifat abadi.

Kemanusiaan yang adil dan beradab yang menggambarkan sebagai hubungan yang bersifat kolektif dan privat sebagai dwitunggal hubungan manusia dengan tanah.

Sifat kolektif ditunjukkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 2 ayat (1) UUPA sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya begitupun sifat privat ditunjukkan dalam Pasal 4 dan Pasal 16 UUPA

Dalam kehidupan bernegara disamping warga negara Indonesia juga hidup secara berdampingan dengan kita yang bukan warga negara Indonesia yang disebut warga asing. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak memandang apakah itu warga negara Indonesia ataupun warga asing. Maka dalam UUPA keadilan itu diciptakan yang dapat kita lihat dalam Pasal 42 UUPA yang menyatakan bahwa yang dapat mempunyai hak pakai salah satunya orang asing yang berkedudukan di Indonesia serta berbadan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Sementara sila ketiga **Persatuan Indonesia** dalam kaitannya dengan pasal UUPA dapat ditunjukkan dalam Pasal 9 ayat (1). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa :

Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA bahwa :

"Hanya warga Indonesia dapat mempunyai hak milik "

Sementara sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditunjuk dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi :

Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Untuk mengamalkan sila kelima dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat maka sekalipun tiap-tiap orang itu laki-laki maupun wanita serta badan hukum yang memperoleh kesempatan untuk memperoleh hak milik atas tanah, pemilikan dan penggunaannya tidak boleh melampaui batas maximum dan/atau minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah . Dan apabila terjadi kelebihan dari batas maksimum maka diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian dan kelebihan tersebut diberikan kepada rakyat yang membutuhkan (Pasal 7 jo Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUPA)

Agar tanah tersebut bermanfaat bagi pemegangnya maka Pasal 10 UUPA mewajibkan agar setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian wajib mengerjakan dan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanahnya sehingga cara-cara pemerasan dapat dicegah.

2.5.2.Landasan Konstitusional

Dasar konstitusi yang dapat dipergunakan dalam mengatur soal tanah di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (berikut amandemen IV). Pasal tersebut menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 33 sebagai dasar demokrasi ekonomi menghendaki agar kemakmuran bagi rakyat dapat dicapai sebagaimana yang dituang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia demi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan yang abadi dan keadilan sosial.

Adanya kata “ dikuasai “ dan “dipergunakan “ oleh Notonagoro dalam pasal tersebut dapatlah kiranya disimpulkan bahwa harus diperbedakan antara dikuasai dan dipergunakan, dalam arti bahwa dipergunakan itu sebagai tujuan dari pada di kuasai ¹²

Kekuasaan yang ada pada Negara sebagai organisasi suatu bangsa diberikan oleh rakyat berdasarkan hukum untuk mengatur berbagai kekuasaan apapun dalam masyarakat. Dasar dan bentuk kekuasaan negara tersebut dapat ditemukan dalam pokok pikiran alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Negara yang berdaulat atas dasar permusyawaratan rakyat.

¹² A.P.Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni Bandung, 1988, hlm 12

Rumusan tersebut mengandung makna bahwa dengan permusyawaratan yang berdaulat dengan berlandaskan hikmah kebijaksanaan maka pengambilan suatu keputusan merupakan cara penyelenggaraan negara yang baik. Dengan demikian akan lahir wujud kepentingan dan kemanfaatan bersama yang memenuhi keluhuran harkat dan martabat. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat terwujud.

Hubungan antara negara dengan tanah selain didasarkan atas kedaulatan negara juga didasarkan atas hukum pada kedaulatan rakyat demi tercapainya keseimbangan hak dan kewajiban yang adil bagi seluruh bangsa yang mendatangkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Negara disini tidak didudukkan sebagai pemilik tetapi tidak lebih sebagai organ penguasa yang diberi kekuasaan (secara hukum) untuk menjamin pelaksanaan peruntukan tanah sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

2.5.3. Landasan Operasional

2.5.3.1. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa :

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat seperti yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut menguasai bumi, air dan ruang

angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Adapun luas dan bentuk penguasaan Negara ini kemudian dalam Pasal 2 (2)

UUPA diuraikan bahwa :

Hak menguasai dari Negara ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Pelaksanaan hak menguasai Negara sebagaimana yang disebut dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA, dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Dapat dikuasakannya kepada daerah-daerah swatantra untuk saat ini dapat diterjemahkan secara lebih meluas yaitu dapat dikuasakan kepada departemen, instansi atau jawatan-jawatan pemerintah. Disini pelaksanaanya tidak lagi sepenuhnya ada pada pemerintah pusat, apalagi dengan berlakunya otonomi daerah maka tiap-tiap daerah dapat menggunakan, memelihara dan mengelola sumber alam yang terkandung dalam wilayahnya atau daerahnya.

Kewenangan yang ada pada pemerintah daerah yang sehubungan dengan adanya otonomi daerah diberi kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan karakteristik berdasarkan acuan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sepanjang tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar yang digunakan dalam

menjalankan pemerintahan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Sehingga keputusan penting dan mendasar yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara harus diputuskan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilannya.

Dalam Pasal 3 ayat dan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah diuraikan hal-hal yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan hal-hal yang merupakan kewenangan ditingkat propinsi. Dari 191 rincian kewenangan yang diuraikan undang-undang tersebut, urusan yang bersifat operasional jumlahnya sekitar 25 buah (15%), yang bersifat fasilitas dan kerjasama sekitar 6 buah (3 %) sedangkan selebihnya sekitar 82 % yang dijalankan oleh pemerintah pusat.¹³ Dilihat dari persentase kewenangan dan pembagian pelaksanaan kewenangan maka kewenangan yang bersifat operasional sebagian besar menjadi kewenangan kabupaten/kota. Tentunya hal ini sesuai dengan hakekat dari prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan diberikan kepada unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Kembali kepada UUPA bahwa dalam pelaksanaan hak menguasai negara yang sebagian dikuasakan kepada daerah swatantra, departemen/instansi/jawatan serta masyarakat hukum adat tidak terlepas dari hak menguasai dari negara adalah agar peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang

¹³ Sadu Wasistiona, Esensi Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (bunga Rampai), Alqaprint Jatinangor, Sumedang, 2001, hlm 17

terkandung didalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA.

Penjelasan Umum angka II (2) UUPA menjelaskan lebih lanjut bahwa pengertian dikuasai oleh negara bukanlah pengertian dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia, untuk tingkatan tertinggi mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Sekalipun peruntukkan, penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara tidak berarti bahwa Negara tidak mengakui adanya hak-hak perorangan.

Pasal 4 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa :

Atas hak menguasai dari Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Adapun luas hak yang diberikan oleh Negara kepada perorangan maupun badan hukum atas tanah meliputi pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan itu dalam batas-batas menurut undang-undang dan aturan-aturan hukum lain yang lebih tinggi. (Pasal 4 ayat (2) UUPA).

Oleh karena itu berdasarkan hak menguasai dari Negara maka menurut

Pasal 8 UUPA pengambilan kekayaan alam yang terkandung didalamnya diatur oleh Negara.

Lebih lanjut dalam Pasal 14 UUPA dikatakan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas yang diberikan Negara kepadanya berdasarkan pendelegasian wewenang membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya . Dan untuk itu setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan (sebagaimana yang disebut dalam Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang).

Atas dasar fungsi sosial dari tanah dan hak menguasai dari negara tersebut dengan mengingat kemanfaatan yang ingin dicapai oleh Negara sebagai kesatuan dari seluruh rakyat maka secara tidak langsung hak-hak yang dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum tidaklah berarti tidak dapat diganggu gugat. Karena Negara sebagai penguasa berdasarkan Pasal 18 UUPA dapat mencabut hak-hak atas tanah tersebut untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara-cara yang diatur undang-undang.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang bahwa :

Setiap orang berhak untuk memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

2.5.3.2. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat seperti yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (berikut amandemen IV) bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, maka hutan yang merupakan satu kesatuan dengan permukaan bumi yang disebut tanahpun dikuasai oleh negara. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan definisi hutan dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa :

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sesuai dengan hak menguasai oleh negara yang ada pada UUPA yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya maka hutan yang merupakan satu kesatuan dengan bumi yang disebut tanah dikuasai oleh Negara.

Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa :

Semua hutan didalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun luas dari kekuasaan Negara terhadap hutan dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan

Dalam Penjelasan Umum dikatakan bahwa penguasaan hutan oleh

Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan, dan atau mengubah status kawasan hutan serta mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Adanya hak menguasai Negara terhadap hutan dimaksud untuk terciptanya penyelenggaraan kehutanan yang berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Hak menguasai yang ada pada Negara tidak berarti bahwa hutan sepenuhnya dikuasai oleh negara. Dalam arti bahwa perorangan tidak dapat memiliki hutan. Perorangan maupun badan hukum dapat saja mempunyai hak atas tanah.

Dalam UUK dikenal adanya hutan negara dan hutan hak. Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Dalam Penjelasan Umum dijelaskan bahwa hutan yang berada pada tanah yang dibebani dengan hak atas tanah dapat berupa hak milik, hak guna usaha maupun hak pakai atau yang lebih dikenal dengan hutan rakyat. Hanya saja dalam UUK tidak dijelaskan lebih lanjut seberapa luas hak yang ada pada perseorangan maupun badan hukum terhadap hutan hak sebagaimana yang dijelaskan oleh UUPA mengenai luas hak yang dapat

dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum atas tanah.

Lebih lanjut lagi bahwa penjabaran kewenangan yang ada pada pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan dalam Pasal 66 bahwa :

Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal tersebut maka pengawasan kehutanan dapat dilakukan tidak hanya Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat tetapi dapat pula dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentu hal ini dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Hak menguasai yang diberikan oleh negara kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan yang dtuangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 15, tidak dilekatkan dengan suatu alas hak.

Menurut Undang-Undang Kehutanan, pengelolaan yang dimaksudkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan rekmalasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi hutan terhadap hutan tidak didasarkan atas suatu alas hak. Hal ini yang membuat perbedaan pengertian antar pengelolaan menurut UUPA dan pengelolaan menurut Undang-Undang Kehutanan.

2.6. Asas-asas Hak Penguasaan Atas Tanah

a. Asas Nasionalitas

Asas ini memberikan pengertian bahwa seluruh bumi (tanah), air dan

ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia adalah merupakan kekayaan alam milik Bangsa Indonesia sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA.

b. Asas Pengakuan Hak Ulayat dan Hak Pribadi

Asas ini dengan tegas mengakui eksistensi dari masyarakat hukum adat, demikian juga perorangan maupun badan hukum Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA. Pasal UUPA mengatakan bahwa :

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat semakin dipertegas keberadaan dengan dikeluarkannya peraturan yang berkenaan dengan hak ulayat yaitu : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat .

c. Asas Fungsi sosial

Asas ini mempunyai arti bahwa semua hak-hak atas tanah disamping memberikan manfaat kepada pemegangnya harus dapat pula memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Fungsi sosial mengandung arti bahwa penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaanya dan sifat dari pada haknya.

Asas ini tertuang dalam Pasal 6 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial

d. Asas Pemerataan/ Keadilan

Asas ini melarang kepemilikan/penguasaan tanah yang berlebihan. Hak menguasai dari negara dapat mengatur peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya dengan tujuan dapat mewujudkan penguasaan tanah yang adil. Setiap pemegang hak dari tanah harus mengusahakan tanahnya secara aktif, menjaga dan memeliharanya sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam (Pasal 15 UUPA).

Pasal 17 UUPA melarang pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas dengan mengatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum, dan apabila terdapat tanah-tanah kelebihan dari maksimum maka tanah tersebut diambil oleh pemerintah dengan memberikan ganti kerugian yang layak untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan (Pasal 17 UUPA).

Disamping itu asas pemerataan inipun secara tersurat disebutkan dalam Pasal 9 (2) UUPA yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah. Dan dalam Pasal 11 ayat b (1) secara tegas mencegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas yang terjadi akibat adanya hubungan hukum antara orang-orang termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa.

2.7 Macam-Macam Hak Penguasaan Atas Tanah

Ada beberapa macam hak penguasaan atas tanah yang dapat ditemukan dalam UUPA yaitu :

a. Hak bangsa sebagai yang disebut dalam Pasal 1 UUPA bahwa:

- 1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia;
- 2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;
- 3) Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi.

Dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (3), hak bangsa merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Nasional. Hak-hak atas tanah yang lain secara langsung atau tidak langsung bersumber padanya.

b. *Hak Menguasai dari Negara*

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat seperti yang disebut dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA mempunyai kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 2 ayat (2) UUPA).

Dalam penjelasan Umum II (2) UUPA dijelaskan bahwa pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki tetapi lebih pada pengertian memberi

wewenang kepada Negara sebagai kekuasaan dari Bangsa Indonesia. Kekuasaan Negara yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa meliputi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak dengan pembatasan bahwa kekuasaan Negara pada tanah yang sudah dihaki terbatas akan isi dari hak tersebut dalam arti bahwa sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya maka sampai disitulah kekuasaan negara tersebut. Sementara terhadap yang belum dihaki maka kekuasaan negara tersebut lebih luas dan sempurna.

c. Hak Ulayat Masyarakat Adat

Hak ulayat masyarakat Hukum Adat merupakan hak penguasaan atas tanah bersama masyarakat-masyarakat hukum adat tertentu Pasal 3 UUPA mengandung pernyataan pengakuan mengenai keberadaan hak ulayat dalam hukum tanah nasional sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

d. Hak-hak perorangan

Hak-hak perorangan yang memberi kewenangan untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah tertentu berupa :

1. Hak-hak atas tanah, yang berupa hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai. Hak-hak ini memberi kewenangan kepada pemegangnya untuk memakai suatu bidang tanah tertentu yang dihaki dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau usahanya
2. Hak atas tanah wakaf, merupakan hak penguasaan atas suatu bidang tanah tertentu bekas hak milik, yang aman oleh pemilik dipisahkan dari harta

kekayaannya dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

3. Hak Tanggungan, merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah yang merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan kepada kreditur tertentu untuk menjual lelang bidang tanah yang dijadikan jaminan bagi pelunasan hutangnya dengan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut bilamana debitur cidera janji. Dikenal pula jaminan secara fidusia.

2.8 Dasar Hukum dan asas Pengelolaan kawasan Hutan

Dasar hukum dalam pengelolaan kawasan hutan bertitik tolak dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki agar Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Implementasi dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (dikenal dengan UUPA). Hal ini dapat dilihat dari Pasal 2 ayat 1 dan 2 sebagaimana telah disebutkan bab sebelumnya.

Pengertian dikuasai oleh negara yang termuat dalam pasal tersebut bukan berarti memiliki. Di kuasai disini dimaksudkan bahwa Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat berhak untuk mengatur pokok-pokok kemakmuran (termasuk hutan) ini agar tujuannya tercapai.

Selain Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2), pasal yang mengandung arti adanya pengelolaan adalah Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi :

Hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Hak pengelolaan ini merupakan salah satu penjabaran dari hak menguasai negara. Perlu diketahui bahwa hak pengelolaan dalam UUPA tidak secara tegas secara eksplisit diatur dalam pasal-pasal nya khususnya mengenai kehutanan. Sebagaimana yang secara limiatif disebutkan dalam Pasal 16 mengenai hak-hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan serta hak-hak yang sifatnya sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian (Pasal 53 UUPA). Mengenai kehutanan yang diatur oleh UUPA adalah hak memungut hasil hutan (Pasal 46) sementara mengenai pengaturan atau pengelolaannya tidak disebutkan.

Lebih lanjut, hak pengelolaan secara emplisit dapat dilihat dari pasal 15 yang berbunyi :

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomis lemah.

Dalam pasal tersebut ditentukan kata penguasaan yang dapat diterjemahkan sebagai kata "pengelolaan ". Peraturan ini masih dianggap

berlaku, karena menurut Pasal 58 UUPA bahwa selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang yang tidak tertulis maupun yang tertulis mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa UUPA serta diberi tafsiran yang sesuai dengan UUPA.

Peraturan lain yang juga mengatur masalah hak pengelolaan adalah Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijakan-selanjutnya.

Dalam Pasal 1 jo Pasal 2 peraturan tersebut menyebutkan bahwa hak atas tanah Negara yang diberikan kepada departemen-departemen. Direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantra sebelumnya berlakunya peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sementara jika selain dipergunakan untuk kepentingan sendiri juga untuk diberikan kepada pihak ketiga maka hak penguasaan tersebut diatas konversi menjadi hak pengelolaan yang berlansung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan rumusan tersebut bahwa sekalipun hak menguasai ada pada negara namun pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra, yang untuk sekarang dapat diperluas maknanya yakni dapat dilaksanakan oleh departemen/instansi/jawatan sesuai dengan bidangnya.

Menurut Budi Harsono bahwa penguasaan tanah negara dengan hak pengelolaan dapat merupakan dasar untuk menyelenggarakan pengurusan tanah oleh daerah-daerah swatantra dan instansi lain¹⁴

Dalam PMDN Nomor 5 Tahun 1973 disebutkan bahwa hak pengelolaan atas negara dapat diberikan kepada departemen dan jawatan pemerintah serta badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah.

Peraturan-peraturan tersebut diatas menunjukan bahwa hak menguasai Negara atas tanah pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada departemen-departemen/instansi/jawatan yang dikenal dengan kata pengelolaan.

Dalam Pasal 1 PMDN Nomor Tahun 1977 tentang tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian hak Atas Bagian-Bagian Tanah hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya, menyebutkan luasnya kewenangan hak pengelolaan yaitu meliputi :

1. menggunakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan
2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya
3. menyerahkan bagian-bagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut yang meliputi segi-segi peruntukkan, penggunaan jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut A.P.Parlindungan, hakekat dari hak pengelolaan adalah pelimpahan (terbatas) dari wewenang keagrarian (sekarang pertanahan) yang ada pada pemerintah pusat dan terkenal dengan istilah hak menguasai dari

¹⁴ Laporan Penelitian tentang *Aspek Hukum Penguasaan Tanah Oleh Negara* dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, hlm 17

negara kepada daerah-daerah otonom, lembaga pemerintahan, departemen dan perusahaan-perusahaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan sistem keagrarian di Republik Indonesia adalah wewenang pemerintah pusat sehingga pemerintah tidak boleh melakukan wewenang itu jika tidak didelegasikan oleh kekuasaan suatu peraturan yang dibuat oleh pemegang Hak menguasai Negara itu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA. Kalaupun ada pendelegasian wewenang itu maka akan jelas tercantum hak-hak apa saja yang didelegasikan tersebut.¹⁵

Kemudian implementasi dari UUPA yang khusus mengatur mengenai kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Karena UUPA merupakan undang-undang yang sifatnya hanya mengatur yang pokok-pokoknya saja.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 41 tahun 1999 mengenai penguasaan hutan dikatakan bahwa :

Semua hutan didalam wilayah Repiblik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ruang lingkup penguasaan Negara terhadap hutan kemudian dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk :

¹⁵ A.P. Parlindungan, *Hak pengelolaan tanah Pelabuhan Menurut Sistem UUPA* dalam seminar sehari Hukum Maritim III, Senin 14 Agustus 1989, hlm 1

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil, hutan
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai kawasan hutan; dan
- c. menngatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan

Sekalipun semua hutan yang berada diwilayah Republik Indonesia itu dikuasai oleh negara namun bukan berarti negara merupakan pemilik dari hutan tersebut. Melainkan mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenang dalam bidang hukum publik, yang mana kemudian kewenangan tersebut lebih lanjut didelegasikan kepada pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan, pengurusan, pemanfaatan dan penggunaan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan, kewenangan hak pengelolaan hutan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah secara pendelegasian wewenang yang meliputi tindakan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan berada pada instansi/departemen yang dipimpin oleh seorang menteri yang menurut Pasal 1 angka 15 adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan.

Atas dasar pelaksanaan hak menguasai dari Negara kepada daerah-daerah swatantra dalam hal ini kepada departemen/instansi/jawatan

kemudian dikaitkan dengan Pasal 15 UUPA jo Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 maka dalam pengelolaan hutan dan kehutanan, instansi pemerintah yang berwenang adalah menteri kehutanan yang membawahi suatu departemen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa :

Pengelola kawasan Hutan adalah instansi yang diberi wewenang untuk mengelola suatu kawasan hutan

Kemudian dalam penyelenggaraan menurut Pasal 66 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa :

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah
- 2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah

Dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pelaksanaan pengurusan hutan yang bersifat operasional.

Implementasi dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas mengenai hak pengelolaan dari Negara kepada pemerintah dalam hal ini adalah departemen yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 jis Keputusan Nomor 25 tahun 1990, menyatakan bahwa departemen kehutanan menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang kehutanan

Dalam teknis pelaksanaan kepengurusan hutan Negara di Kabupaten Kerinci yang berada dalam wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat yang luasnya di kabupaten Kerinci 215.000 Ha pengelolaannya dibawah Balai Taman Nasional Kerinci Seblat yang bertanggung jawab langsung terhadap pemerintah pusat (Dirjen Kehutanan dan Konservasi Alam). Penunjukan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat yang mengelola kawasan hutan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-II/1999 pada bulan Oktober tahun 1999, wilayah kerja dari Balai Taman Nasional Kerinci Seblat adalah Seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat yang dibagi atas 4 (empat) wilayah yaitu :

- Seksi Konservasi Wilayah I Lokasi di Bangko propinsi Jambi
- Seksi Konservasi Wilayah II Lokasi di Curup Propinsi Bengkulu
- Seksi Konservasi Wilayah III Lokasi di Painan propinsi Sumatera Barat
- Seksi Konservasi Wilayah IV Lokasi di Lubuk Linggau Propinsi SumSel

Pembagian wilayah kerja Balai TNKS unit Kerinci meliputi kawasan hutan yang ada di kabupaten Kerinci dengan luas kawasan hutan yang dimiliki seluruhnya 215.000 Ha

Tugas Balai TNKS dititik beratkan pada pemeliharaan dan pengamanan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang arealnya

berada di 4 (empat) propinsi yaitu propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Bengkulu serta di Propinsi Sumatera Selatan.

Disamping wewenang-wewenang yang ada pada Balai TNKS, maka dalam penyelenggaraan kehutanan hendaknya memperhatikan asas-asas kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUK bahwa :

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpadaun

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian, unsur lingkungan, sosial dan budaya ekonomi.

Berasaskan kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

Disamping itu didalam penyelenggaraan kehutanan didasarkan pula asas kebersamaan. Maksudnya adalah didalam penyelenggaraan kehutanan perlu diterapkan pola usaha bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan pemerintah (dalam hal ini departemen/instansi/ jawatan) dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, koperasi dan menengah.

Asas keterbukaan dimaksudkan agar didalam penyelenggaraan setiap kegiatan mengikutkan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.

Begitu pula dengan asas keterpaduan. Dengan berlandaskan asas ini agar dalam penyelenggaraan kehutanan dapat dilakukan secara terpadu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, sektor lainnya serta masyarakat setempat.

2.9 Kewenangan Pengelola kawasan Kehutanan

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan, bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara.

Pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan mengandung suatu kewajiban dan wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan.

Penguasaan atas hutan adalah, dalam hal ini tentu saja negara tidak melaksanakan sendiri hak kekuasaannya melainkan dilaksanakan oleh menteri Kehutanan sebagai yang ditunjuk oleh undang-undang (Pasal 1 angka 15 UUK) untuk melaksanakan dan bertindak untuk dan atas nama negara dan Pemerintah untuk menjalankan hak menguasai oleh Negara terhadap hutan. Bentuk Kewenangan Menteri Kehutanan dalam menjalankan hak menguasai hutan adalah Sebagai berikut :

- a. Menteri Kehutanan selaku pemerintah menyatakan, apakah suatu hutan sebagai hutan negara atau hutan milik (Pasal 5 UUK)
- b. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
- c. Menetapkan status wilayah menjadi kawasan hutan atau kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan termasuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dengan didasarkan pada penelitian terpadu
- d. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum anantara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan
- e. Menteri kehutanan selaku pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi (Pasal 6 ayat 2)
- f. Menteri Kehutanan selaku pemerintah menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus yakni untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan relegi dan budaya (Pasal 8)
- g. Menteri Kehutanan menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan serta menunjuk wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan (Pasal 14 dan Pasal 5 PP Nomor 33 tahun 1970)
- h. Menteri Kehutanan menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan (Pasal 16)

- i. Menteri Kehutanan selaku pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, sosial dan masyarakat setempat.
- j. Menteri Kehutanan berwenang memberikan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk penggunaan kepentingan diluar kegiatan kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu serta kelestarian lingkungan (Pasal 38)
- k. Menteri Kehutanan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang berdampak nasional dan internasional
- l. Menteri Kehutanan dapat memberikan hak penguasaan hutan tanaman industri kepada BUMN. Swasta dan koperasi yang memenuhi syarat untuk jangka waktu 35 tahun ditambah daur tanam pokok yang diusahakan
- m. Dari beberapa uraian tersebut dapat diketahui bahwa departemen kehutanan/menteri kehutanan menguasai hutan dan/atau kawasan hutan termasuk tanahnya atas dasar pendelegasian wewenang yang diberikan oleh/ berdasarkan undang-undang.

Kekuasaan Negara atas hutan yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa jauh negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan haknya sampai disitulah batas kekuasaan negara. sedangkan

kekuasaan negara terhadap hutan yang tidak dibebani dengan sesuatu hak adalah lebih luas dan penuh.

2.10 Aspek-Aspek pengelolaan Hutan

a. aspek yuridis

Secara historis aspek hukum dalam mengelola dan memanfaatkan hutan telah melekat pada masyarakat Indonesia sejak zaman pemerintahan Kolonial Belanda, zaman kemerdekaan hingga sekarang.

Peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan ditujukan untuk berbagai macam kepentingan tergantung kepada penguasa tertentu termasuk aturan adat yang berlaku pada tatanan kehidupan masyarakat pada hirarki yang paling bawah.

Pada dasarnya hukum yang mengatur pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan hutan di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok yaitu warisan kolonial, pemerintah Republik Indonesia, aturan adat.¹⁶

a. Warisan Kolonial.

Pada dasarnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah lebih untuk memperoleh hasil hutan dengan cara yang mudah, murah, lestari dan atau untuk melindungi dan mengamankan sumber daya alam yang dianggap penting.

¹⁶ Hari Budianto, Laporan Akhir Tim Kompilasi Bidang Hukum Kehutanan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI, 1999/200

Peraturan yang dikeluarkan lebih ditekankan dalam bentuk kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh rakyat, maupun larangan dan sanksinya.

Adapun Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pada pemerintahannya

- Reglemen 1865
- Reglemen 1874 tentang pemangkuan hutan dan eksploitasi hutan di Jawa dan Madura. Alasannya dikeluarkan reglemen ini adalah musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur dan adanya pembabatan hutan
- Reglemen 1897, merupakan reglemen hutan untuk pengelolaan hutan negara di Jawa dan Madura. Pada reglemen ini pengertian hutan ada 3 unsur esensial yaitu
 - Semua lahan bebas yang gundul domein negara
 - Semua lapangan yang dicadangkan pemerintah demi kepentingan mempertahankan dan memperluas hutan yang termasuk semua lahan pada saat penataan batas dimasukan sebagai kawasan hutan
 - Tanaman hutan yang telah atau akan dibina oleh negara selama pemangkuan hutan belum diatur
- Reglemen mengenai unsur esensial hutan negara, reglemen ini meliputi pula tentang pembagian hutan negara, pemangkuan hutan dan eksploitasi hutan

melemah, meskipun keberadaannya dijamin seperti dalam Pasal 4 jo Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999.

Dalam hal ini, pemerintah menetapkan status hukum atas hutan atas hutan apakah merupakan hutan negara ataukah hutan milik. Sementara hutan adat berdasarkan Pasal 5 UUK merupakan atau termasuk hutan negara. Hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya maka menurut Pasal 67 ayat (1) berhak :

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah. Pengukuhan keberadaan maupun hapusnya masyarakat hukum adat dengan peraturan daerah.

b. aspek sosiologis

Kehidupan masyarakat sekitar hutan dengan hutan yang berada disekitarnya menunjukkan interaksi yang sangat kuat bahkan telah menyatu,

- Regelemen 1913 tentang reglemen untuk pemangkuan hutan negara di Jawa dan Madura. Dalam reglemen ini diatur mengenai pemangkuan hutan, eksploitasi hutan, pengamanan hutan, pemberian izin kepada masyarakat untuk mengembalakan ternak dalam hutan negara dan pemberian izin berburu.
- Besleit Pemerintah Belanda Nomor 44 tahun 1927 tentang hutan lindung didaerah kabupaten Kerinci

b. Pemerintah Republik Indonesia

Pada masa kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) peraturan-peraturan bidang kehutanan mulai diterbitkan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan serta mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara serta orang dengan hutan dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

c. Peraturan Berdasarkan Hukum Adat

Hak untuk memanfaatkan hutan oleh masyarakat hukum adat, dengan adanya perundang-undangan yang bersifat nasional, semakin hari semakin

dan hal ini telah berlangsung sejak nenek moyang mereka hidup di wilayah itu. Hutan telah menjadi sumber kehidupan.

Ketergantungan masyarakat yang ada disekitar hutan terhadap hutan sebagai sumber kehidupan sangat tinggi. Sehingga sering menimbulkan persoalan antara pihak yang mempunyai kewenangan mengelola hutan dengan hutan dengan masyarakat sekitar hutan. Oleh Karenanya undang-undang menghendaki agar pengelolaan hutan dikuasai oleh negara. Hal ini untuk mencegah penguasaan ditangan satu orang yang berkuasa sehingga mengganggu keseimbangan hidup masyarakat sekitarnya.

Dalam Pasal 2 UUK dikatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka penyelenggaraan kehutanan dilakukan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan sumber daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta menajamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan (Pasal 3 UUK)

c. aspek ekologis

Hutan menurut Pasal 6 UUK mempunyai tiga fungsi yakni fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Hal ini bertujuan agar hutan

di manfaatkan dan dipergunakan sesuai dengan peruntukan sehingga mencapai keseimbangan lingkungan yang diinginkan. Seperti Hutan Konservasi yang fungsi pokoknya adalah pengawetan terhadap keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, memelihara tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan hutan produksi diperuntukkan sebagai hutan untuk memproduksi hasil hutan.

Untuk memperoleh hasil yang diinginkan yakni memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsinya maka pemerintah melakukan kegiatan yang dinamakan pengurusan hutan. Didalam pengurusan hutan kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah perencanaan hutan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan hutan serta kegiatan pengawasan.

Dalam kegiatan perencanaan hutan sebagai mana dalam Pasal 11 UUK, salah satunya kegiatannya adalah penatagunaan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. Tujuan dari pembentukan wilayah pengelolaan hutan adalah untuk mempermudah didalam melakukan pengelolaan, pengurusan dan pemanfaatan sekaligus tindakan pengawasan hutan didaerah-daerah karena hutan yang berada diwilayah Indonesia begitu luas, banyak dan tersebar.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dengan menggunakan metodologi seseorang diharapkan mampu untuk menemukan, menentukan, menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metodologi dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mempergunakan pengetahuan dari sumber-sumber primer dengan tujuan untuk menentukan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi diluar sampel yang diteliti.¹⁷

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah dipegang.

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) dengan demikian berarti mencari kembali.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang

¹⁷ Kamarudin, *Metode Penelitian Skripsi dan Thesis*, Bandung, 1974, hlm 27

bersangkutan¹⁸.

Metodologi yang diterapkan dalam setiap penelitian suatu ilmu akan selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang sudah menjadi dasarnya. Dengan demikian suatu metodologi yang dipakai akan mempunyai suatu ciri-ciri tertentu yang mempunyai kekhususan dan merupakan idenditasnya, karena itulah ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum, bahwa :
“penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.”¹⁹

3.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak atau ditinjau dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yaitu UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Undang- Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan tertulis lainnya. Sedangkan Pendekatan secara empiris karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan mempelajari bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat.

3.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 43

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Graha Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 9

kasus dengan penguraian secara deskriptif analitis yaitu yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3.4 Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.²⁰

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut.

Penentuan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, dimana setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai unsur dari sampel yang akan ditarik, maka setiap orang secara teoritis mendapat kesempatan yang sama terpilih sebagai sampel yang bersifat mandiri (*independent*).²¹

Cara yang digunakan dalam penarikan sampel adalah dengan undian dimana setiap unsur populasi diberi nomor pada secarik kertas, yang kemudian dicampur adukan dalam satu tempat (kotak). Apabila pada penarikan pertama dan selanjutnya kertas yang dipilih tidak dikembalikan lagi dalam kotak.

Maka penulis menetapkan jumlah sebagai berikut :

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro *Metologi Penelitian hukum dan Juritmetri*, Graha Indonesia, Jakartsn, 1990 hlm 44

²¹ *ibid*

1. 1 orang ketua adat yaitu Ketua lembaga Adat Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur (memang hanya satu saja Ketua Lembaga adat di Lempur Kecamatan Gunung Raya)
2. Kepala Desa/Lurah
 - 2 Desa dan 1 Kelurahan yaitu
 1. Desa Lempur Mudik
 2. Desa baru Lempur
 3. Kelurahan Lempur Tengah
3. Petani penggarap
 - Jumlah 250 orang
 - Diambil 50 orang
4. Pihak Balai TNKS
5. Kepala Kantor Badan Pertanahan nasional kab Kerinci
6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kerinci

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Didalam bukunya tentang Metode Penelitian Hukum , Ronny Hanitijo

Soemitro Membagi jenis data dan sumber data atas 2 (dua) Yaitu :

“ data primer data data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum sekunder berupa norma dasar pancasila, Undang-Undang 1945, Undang-Undang, yurisprudensi, Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum Sekunder berupa : rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tertier berupa biografi dan indek komulatif.²²

²² Of cit, hlm 9

Data yang dikumpulkan dalam penulisan tesis ini meliputi data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data meliputi :

- a. *Data primer* yaitu data yang diperoleh secara langsung ditempat dengan melaksanakan penelitian lapangan, dalam hal ini data diperoleh dari keterangan responden
 - b. *Data sekunder* ini diperoleh dengan melaksanakan penelitian kepustakaan yang didapat dari bahan pustaka, literatur-literatur yang terkait dengan topik penelitian ini, juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari :
 - a. Bahan-bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan objek penelitian yakni
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Tap MPR NO.IX/MPR RI/2001
 3. UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
 4. UU 51/Prp/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
 5. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan pelaksanaanya
 6. UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional

Tahun 2000-2004

7. Serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis ini
- b. Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, seperti Reperensi, Surat Kabar, Majalah, Buletin, Seminar, Laporan dan Hasil Penelitian.

Alat pengumpul data yang penulis gunakan dilokasi penelitian adalah:

Wawancara / interview

Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara atau interview yang dilakukan untuk mempertegas data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang menjadi sampel dalam penulisan ini, yaitu petani penggarap, pihak Balai TNKS/ Dinas Kehutanan. Tokoh Adat, Kepala Desa.

Pelaksanaan wawancara menggunakan sistem wawancara tak terstruktur. Dalam hal ini ini penulis sebagai pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maksud dari wawancara tak terstruktur adalah responden biasanya terdiri dari mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas dimana responden memiliki mengetahui situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

Menurut Lexi J. Moleong , Wawancara tak terstruktur dilakukan pada keadaan berikut :

- a. Bila wawancara berhubungan orang penting
- b. Jika wawancara ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam lagi seorang subjek tertentu;

- c. Apabila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat "penemuan " (*discovery*)"
- d. Jika ia tertarik untuk mempersoalkan bagian-bagian yang tidak normal (*etilogi*);
- e. Jika ia tertarik untuk berhubungan langsung dengan salah seorang responden
- f. Apabila ia tertarik untuk mengungkapkan motivasi, maksud atau penjelasan dari responden
- g. Apabila ia mau mencoba mengungkapkan pengertian suatu peristiwa, situasi, atau keadaan tertentu.

3.6 Analisa Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan untuk menganalisa data yang diperoleh dilapangan. Tujuan analisa ini untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai penguasaan tanah oleh masyarakat dan selanjutnya mampu memberikan jalan keluar terhadap kekurangan yang timbul dalam praktek.

3.7 Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian ini secara garis besar akan dibagi dalam lima bab dan antara bab yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang sangat erat, lima bab tersebut tersusun sebagai berikut

Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang penelitian,

perumusan masalah, maksud serta kegunaan penelitian.

Tinjauan Pustaka Dalam bab kedua ini, penulis mencoba menguraikan tanah dan hak atas tanah. Tanah dan hak atas tanah ditinjau dari segi landasan pengaturannya, Adanya asas-asas hukum pertanahan. Bahwa diatas tanah ada hak-hak penguasaan, macam dari hak penguasaan atas tanah serta aspek hukum hak penguasaan negara.

Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan sistem metodologi yang dipakai dalam penulisan tesis ini, sehingga penulis dalam meneliti selalu berpatokan dan sejalan dengan sistem metodologi yang ada

Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan penulis berikut pembahasannya. Dimana penulis menjawab permasalahan yang disebutkan diatas dengan menggunakan acuan kepada peraturan-peraturan sebagai kajian yuridis dan didukung dari berbagai literatur.

Penutup. Dalam bab ini diuraikan mengenai Kesimpulan dan saran-saran

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Gunung Raya

a. Letak Kecamatan

Kecamatan Gunung Raya terletak di Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, adapun wilayah Kecamatan Gunung Raya itu sendiri terdiri dari 15 (lima belas) desa serta 1 (satu) kelurahan, yaitu :Kelurahan Lempur Tengah, Desa Lempur Mudik, Desa Lempur Hilir, Desa Baru Lempur, Desa Lolo Gedang, Desa Pasar Kerman, Desa Lolo Hilir, Desa Lolo Kecil, Desa Talang Kemuning, Desa Tanjung Syam, Desa Selampaung, Desa Perikan Tengah, Desa Air Mumu, Desa Kebun Baru, Desa Masgo, Desa Sungai Hangat.

Dari monografi yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Gunung Raya tahun 2002, Kecamatan Gunung Raya terletak antara 1-9 sampai dengan 2-20 lintas selatan dan 10-08 sampai dengan 101-50 bujur Timur dan terletak pada ketinggian 750- 975 meter dari permukaan laut dengan suhu maksimum 26 C dan suhu Minimum 20 C dan dgn curah hujan sebesar 4000 mm/tahun

Ibu Kota kecamatan Gunung Raya Terletak di Kelurahan Lempur Tengah, yang mana jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten adalah 35 kilometer yang hanya dapat ditempuh melalui jalan darat.

Daerah Kecamatan Gunung Raya terletak didaerah kaki-kaki Bukit Barisan, maka daerah ini merupakan daerah dataran tinggi. Sesuai dengan fotografinya, maka Kecamatan Gunung Raya beriklim tropis yang terbagi atas daerah Perbukitan dan rawa-rawa. Beberapa desa di Kecamatan Gunung Raya terdapat dilereng-lereng bukit dan kaki bukit. Dari keadaan wilayah tersebut sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian rakyat.

b. Batas Wilayah Kecamatan

Kecamatan Gunung Raya terletak dibagian sebelah Tenggara dari Kabupaten Kerinci yang membentang dari arah Timur Laut Ke Barat Daya yang berbatasan dengan :

1. Sebalah Utara : Kecamatan Keliling Danau
2. Sebalah Selatan : Propinsi Bengkulu
3. Sebalah Timur : Kecamatan batang Merangin
4. Sebalah Barat : Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Barat.

c. Keagrariaan

Dari luas keseluruhan Kecamatan Gunung Raya dilihat menurut penggunaannya adalah lebih banyak diperuntukan sebagai lahan pertanian diluar kehutanan, hal ini disebabkan karena keadaan tanah sebagian besar merupakan lahan yang subur dan sangat cocok untuk lahan pertanian rakyat. Mengenai Komposisi dari penggunaan tanah didaerah Kecamatan Gunung Raya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I
Komposisi Penggunaan Tanah Di Kecamatan Gunung Raya
Kabupaten Kerinci

No.	Lahan	Luas (ha)	%
1	Perkampungan	314	0,74
2	Sawah	1120	2,63
3	Perkebunan Rakyat	11.404	26,83
4	Hutan	28.008	65,89
5	Lain-lain	1.664	3,92
	Jumlah	42.510	100

*Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci
2004*

Dari angka-angka pada tabel tersebut diatas jelaslah menunjukkan 65,89 % dari luas kecamatan Gunung Raya merupakan hutan yang belum di jamah atau dikerjakan oleh tangan manusia dan lahan pertanian berada di peringkat ke 2 (dua).

4.1.2 Taman Nasional Kerinci Seblat

a. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Mackinnon, Child dan Thorsell memberikan batasan kriteria Taman Nasional adalah kawasan luas yang relatif tidak terganggu yang mempunyai

nilai alam yang menonjol dengan kepentingan pelestarian yang tinggi, potensi rekreasi yang besar mudah dicapai oleh pengunjung dan manfaat yang jelas bagi wilayah tersebut.

Taman Nasional merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi yang mempunyai fungsi dan peranan yang paling lengkap jika dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya. Taman Nasional mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan keanekaragaman hayati dan ekosistem serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam rangka untuk menjaga dan mengelola sumber daya tersebut maka perlu dilakukan antisipasi langkah-langkah untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya tersebut sebaik mungkin bagi kehidupan. Konservasi dan kelestarian alam telah menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan berbasis ekosistem untuk kelestarian tersebut, pada tahun 2000 telah ditetapkan kawasan konservasi seluas 56.482.407,20 ha yang tersebar didaratan maupun perairan. Salah satunya jenis kawasan konservasi yang dikelola adalah Kawasan Taman Nasional. Luas total kawasan Taman Nasional di Indonesia adalah 14.753.176,18 ha yang terbagi kedalam 39 unit dengan lokasi 33 unit berada di daratan serta 6 unit berada di wilayah perairan. Penetapan kawasan Taman Nasional dipandang sangat strategis terutama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan tanpa mengesampingkan aspek kelestarian sumber daya alam hayatinya.

Salah satu Taman Nasional yang menjadi perhatian dunia adalah Taman Nasional Kerinci Seblat.

Taman Nasional Kerinci Seblat adalah merupakan suatu kawasan yang memegang peranan yang amat penting bagi keseimbangan ekologi di Indonesia, khususnya di Sumatera, dimana TNKS ini mencakup beberapa propinsi di Sumatera yaitu Propinsi Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Bengkulu. TNKS merupakan Taman Nasional terbesar di Sumatera dan nomor dua terbesar di Indonesia, yang memiliki kekhasan dalam kekayaan keanekaragaman flora dan fauna. Dimana berfungsi sebagai pengendali erosi banjir dan merupakan sumber dan dinyatakan sebagai paru-paru dunia.

Kawasan TNKS memiliki potensi vital bagi keseimbangan lingkungan dan kelangsungan hidup manusia maupun konservasi dan pelestarian flora dan fauna. Demi usaha pengembangan dan usaha konservasi, pemerintah mengelola kawasan tersebut secara terpadu dan selaras yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

b Tujuan dan fungsi Taman Nasional

Asas pembangunan kehutanan adalah kelestarian hutan dan manfaat yang progresif. Hal ini dapat pula diklasifikasikan sebagai pembangunan kehutanan yang berorientasi tata lingkungan hidup manusia.

Atas dasar dan orientasi itu tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan kehutanan adalah manfaat yang sebesar-besarnya secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung, dalam usaha turut

membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Taman Nasional merupakan kawasan yang lindungi oleh Undang-undang, menurut Pasal 2 Keputusan Presiden No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan menurut Ditjen PHPA tahun 1986 menyebutkan bahwa Tujuan pembangunan Taman Nasional adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pengelolaan yang berhasil guna dan berdaya guna. Hal ini dapat dicapai dengan perencanaan dan pembinaan melalui struktur organisasi yang mantap serta prasarana dan sarana yang memadai.
2. Mewujudkan upaya konservasi potensi sumber daya alam yang berfungsi sebagai pelindung unsur ekologi dan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis plasma serta pelestarian pemanfaatan penunjang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.²³

Tujuan pembangunan TNKS seperti halnya tujuan pembangunan taman nasional lainnya yaitu perlindungan proses ekologis, pengawetan keanekaragaman hayati flora, fauna dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pembangunan TNKS menempuh beberapa kebijaksanaan yaitu :

²³ Ditjen perlindungan hutan dan pelestarian alam, Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Nasional, Departemen Kehutanan, 1993

1. Mengupayakan agar kawasan TNKS tetap terjaga dan terjamin kelestariannya. Karena itu segala gangguan dan permasalahan yang mengancam TNKS segera dicegah dan ditanggulangi.
2. Mengupayakan agar semua jenis flora dan satwa beserta ekosistemnya terjamin keberadaannya dan secara bertahap dapat diidentifikasi dan diketahui nama dan nilai kegunaannya bagi kehidupan manusia baik untuk ilmu pengetahuan, obat-obatan, makanan dan lain-lainnya
3. Optimalisasi pemanfaatan semua potensi yang ada agar dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya khususnya dan setiap generasi manusia pada umumnya.

Selain apa yang disebut diatas bahwa fungsi dari TNKS adalah untuk menjaga pelestarian keanekaragaman dan keunikan ekosistem alam serta pengamanan daerah tangkapan air yang sangat penting bagi daerah di 4 (empat) wilayah provinsi yaitu, provinsi Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.

c. Pengelolaan TNKS

Menurut UU No 5 tahun 1990, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaannya maka kawasan Taman nasional Kerinci Seblat dibagi kedalam beberapa Sistem pengelolaannya didasarkan pada

zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain yang sesuai dengan fungsi dan kondisinya.

Dalam pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat pemerintah Pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam menyerahkan kepada Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (BTNKS) untuk mengatur dan mengelolanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 901/Kpts-II/1999.

Balai Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan unit pelaksanaan teknis dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang diberi tugas melaksanakan Pengelolaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan diwilayah kerjanya. Wilayah kerjanya meliputi 9 (sembilan) kabupaten dan satu Pemerintah kota di empat propinsi Pulau Sumatera yaitu Propinsi Jambi. Sumatera Barat. Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan.

4.1.3.Kondisi sosial ekonomi petani penggarap

a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh di Kecamatan Gunung Raya Pada Tahun 2004 adalah 18.879 jiwa dengan perincian 9.804 jiwa laki-laki dan 9472 jiwa wanita. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Kecamatan Gunung Raya, berikut ini akan digambarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2004 didesa-desa Kecamatan Gunung Raya adalah sebagai berikut :

Tabel II
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Penyebaran
di Desa-desa Kecamatan Gunung Raya

No	Desa	Jenis kelamin		jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kelurahan Lempur Tengah	1.052	1.063	2.115
2	Lempur Mudik	530	574	1.104
3	Baru Lempur	480	435	915
4	Lempur Hilir	348	337	685
5	Perikan Tengah	397	334	731
6	Selampuang	572	510	1.082
7	Masgo	606	498	1.104
8	Air Mumu	763	706	1.469
9	KebunBaru	671	706	1.377
10	Sungai Hangat	454	448	902
11	Pasar Kerman	343	341	684
12	Lolo Hilir	748	937	1.685
13	Lolo Gedang	675	679	1.354
14	Lolo Kecil	649	781	1.430
15	Talang Kemuning	836	822	1.658
16	Tanjung Syam	283	301	584
jumlah		9.407	9.472	18.879

*Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci
2004*

Di Kecamatan Gunung Raya terutama didaerah penulis melakukan penelitian, masyarakat sangat menyadari betapa penting pendidikan, hal ini dapat dilihat dari dibangunnya SD di setiap desa, sehingga hampir sebahagian besar penduduk usia sekolah, sedang dan telah mengenyam pendidikan dasar. Sementara SMP baru didirikan di 3 (tiga) tempat yaitu di Lempur Tengah, Sungai Hangat dan Lolo Gedang. Sedangkan SMA hanya didirikan di Desa Baru Lempur. Untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, biasanya mereka melanjutkan ke Kota Padang, Jambi dan juga ada yang mengikuti kuliah di pulau Jawa terutama Daerah Yogyakarta.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Gunung Raya sangat peduli terhadap pendidikan anaknya. Tetapi 5 (lima) tahun terakhir ini masyarakat Kecamatan Gunung Raya khususnya tempat penulis melakukan penelitian seiring dengan krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, minat para pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan dibangku SMU kejenjang pendidikan yang lebih tinggi sedikit menurun. Hal ini disebabkan karena turunnya harga hasil pertanian dipasaran yang diproduksi oleh petani penggarap tersebut, contoh: harga kopi, kayu manis.

b. Mata Pencarian

Mata Pencarian suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh bangsa itu sendiri, disamping itu keadaan alam sekitar juga ikut berperan menentukan mata pencarian disuatu daerah, misalnya mata pencarian penduduk didaerah perkotaan tentu berbeda dengan yang tinggal didaerah pedesaan begitu juga halnya mata pencarian masyarakat yang bertempat tinggal

di daerah pinggir pantai berbeda dengan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Gunung Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III
Mata Pencaharian Penduduk
Di Kecamatan Gunung Raya 2004

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani	11.992	91,87
2	Buruh tani	512	3,92
3	Buruh bangunan	135	1,03
4	Pedagang	240	1,84
5	Pegawai Negeri sipil/TNI/Polri	174	1,33
jumlah		13.053	100

Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci 2004

Dilihat dari tabel diatas, maka dapat dikemukakan bahwa mata pencaharian masyarakat Gunung Raya lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, bertani merupakan sebagai mata pencaharian pokok bagi masyarakat di Kecamatan Gunung Raya. Dari hasil pertanian ini masyarakat dapat membiayai hidup keluarganya sehari-hari maupun untuk membiayai pendidikan anaknya.

Pekerjaan alternatif lain adalah sebagai pedagang hasil bumi pertanian terutama kulit manis dan kopi, baik sebagai pedagang tingkat kecamatan maupun sebagai pedagang tingkat kabupaten, selain dari itu di kecamatan Gunung Raya juga terdapat buruh harian, yaitu orang yang diupah

perharinya untuk mengerjakan lahan pertanian maupun bekerja disawah. Upah yang diharuskan dikeluarkan untuk mengerjakan lahan pertanian dan sawah adalah Rp 10.000- 15.000,- per harinya dengan waktu kerja mulai jam 8.00-WIB sampai jam 16.00 WIB

4.2. Pembahasan

Dalam perspektif hak menguasai oleh Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (1)UUPA maka bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, termasuk kawasan hutan dikuasai oleh negara adalah semata-mata untuk mencapai tujuan Negara mewujudkan masyarakat adil dan makmur didalam menikmati pokok-pokok kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan pendelegasian wewenang dari Negara kepada pemerintah serta sejalan dengan undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 berikut dengan Peraturan pelaksanaanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dibidang Kehutanan dan Tap MPR RI Nomor IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam, maka daerah berwenang dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan yang meliputi antar lain penetapan kriteria pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, rekmalasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan areal perkebunan.

Disamping berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah maka penataan terhadap ataupun penetapan dan penunjukan suatu kawasan menjadi kawasan hutan disesuaikan pula dengan rencana penataan ruang

daerah setempat. Perlu memperhatikan aspek penataan ruang yang dituangkan dalam rencana tata ruang daerah setempat. Dalam Pasal 14 UUPA menyebutkan :

- 1) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia , membuat suatu rencana umum mengenai persedian, peruntukan dan penggunaan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
 - a. Untuk keperluan Negara
 - b. Untuk keperluan peribatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. Untuk keperluan pusat kehidupan masyarakat sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan ;
 - d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi.
- 2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan yang bersangkutan. Pemerintah Daerah mengatur persediaan sesuai dengan daerah masing-masing.
- 3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan mengenai daerah tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

Oleh karena ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah, sehingga kalau ruang dikaitkan dengan pengaturannya maka haruslah jelas batas-batas, fungsi dan sistemnya dalam satu kesatuan. Untuk itu penataan ruang ini harus didasarkan pada karekteristik dan daya dukungnya guna meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya, seperti penunjukan dan penetapan kawasan hutan di Kecamatan Gunung Raya sebagai Taman Nasinal Kerinci Seblat.

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah taman nasional yang rencana penetapannya tertuang dalam surat menteri Pertanian Nomor 736/mentan/X/1982, pada tanggal 14 oktober 1982. Taman Nasional Kerinci Seblat ini merupakan gabungan dari 17 kelompok hutan dimana sebahagian berbentuk hutan lindung register tahun 1921-1926, cagar alam dan suaka margasatwa pada kurun waktu 1978-198, ditambah dengan beberapa kawasan hutan produksi. Taman Nasional Kerinci Seblat juga merupakan gabungan dari beberapa peruntukan hutan: hutan cagar alam (299.970 ha), hutan suaka alam (368.185 ha), hutan lindung (657.629 ha) serta hutan produksi dan hutan peruntukan lainnya (165.866 ha) sehingga luas keseluruhan 1.484.660 ha.²⁴

4.2.1 Kepastian dan perlindungan hukum petani penggarap.

Hingga saat ini dasar hukum bagi petani penggarap untuk memberikan kepastian hukum atas usahanya menggarap lahan yang merupakan tanah kehutanan belumlah ada, sehingga hal ini terkadang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk berbuat sewenang-wenang kepada petani penggarap.

Keadaan ini biasanya terjadi pada tanah-tanah perkebunan dan kehutanan yang di garap oleh petani penggarap. Hak garap terjadi atas dasar perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau pajak kepada pemiliknya.

Dasar atau landasan yang digunakan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi petani penggarap adalah Pasal 6 UUPA yang

²⁴ Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Kerinci, 2004

menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam pengertian bahwa tanah tersebut dipergunakan sesuai dengan sifat dan peruntukannya yang keuntungannya tidak hanya untuk pemiliknya tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya.

Kemudian berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPA dikatakan bahwa :

Untuk setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Sampai saat ini peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum dari pada penggarapan tanah adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya yang dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 dijadikan Undang-Undang.

Dalam Pasal 5 UU No 51 Tahun 1960 menyebutkan bahwa:

1. Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-Undang Darurat No. 8/1945 jo Undang-Undang Darurat No 1/1956 tersebut, selanjutnya menurut ketentuan-ketentuan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian.
2. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 1 pasal ini maka Menteri Agraria dengan Menteri Pertanian, dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang mulai berlaku sejak tanggal 12 Juni 1954
3. Didalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu Menteri Agraria dan instansi yang ditunjukannya mempunyai wewenang pula sebagai yang dimaksud dalam pasal 4
4. Didalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya didaerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya, dengan ketentuan, bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya

penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Disamping hal tersebut diatas dasar yang dijadikan oleh masyarakat adalah surat anjuran yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria No Sekr 9/2/4 tanggal 4 mei 1962 tentang kebijaksanaan dalam melaksanakan Undang-Undang No 51 Prp. Tahun 1960 pada angka 4 menyatakan sebagai berikut :

tanah-tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lainnya yang dikuasai langsung oleh negara yang telah digarap oleh rakyat, lagi pula tidak akan dipergunakan oleh pemerintah atau instansi yang berkepentingan, pada dasarnya akan dijadikan tanah pertanian dan dibagikan kepada rakyat sambil memperbaiki sosial ekonominya.

4.2.2 Status hak Atas Tanah Bagi Penggarap.

Hak garap atas suatu tanah/lahan bukan berarti memiliki lahan tersebut. Yang terjadi diatas tanah tersebut adalah suatu hak pengelolaan/pemanfaatan/ penggunaan tanah tersebut yang didasarkan pada suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban kepada penggarap untuk membayar pajak atas lahan yang digarapnya. Namun tidak menutup kemungkinan hak garap tersebut berubah menjadi hak milik apabila diajukan permohonan hak milik atas lahan garapannya oleh penggarap. Status hak atas tanah ini berkaitan dengan sistem tenurial atau sistem penguasaan.

Sistem tenurial (*tenure system*) sama artinya dengan sistem penguasaan atas tanah sumber daya agraria dalam suatu masyarakat. Kata *tenure* berasal dari kata dalam bahasa Latin *tenere* yang mencakup arti

memelihara, memegang, memiliki. Menurut Gunawan Wiradi, istilah ini biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang membahas masalah yang mendasar dari aspek penguasaan sumber daya yaitu mengenai status hukumnya. Disamping itu James Cridell memakai sistem tenurial sebagai kumpulan atau serangkaian hak-hak. "*tenure system in a bundle of rights*." Maksudnya tentu sekumpulan atau serangkaian hak untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria yang terdapat dalam suatu masyarakat yang secara bersamaan juga memunculkan sejumlah batasan-batasan tertentu dalam proses pemanfaatan itu.²⁵

Pada setiap *tenure system*, masing-masing hak bermaksud setidaknya mengandung tiga komponen, yakni: ²⁶

- a) Subjek hak, yang berarti pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilekatkan.
- b) Objek hak, yang berupa persil tanah, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh diatas tanah, barang-barang tambang atau mineral yang berada didalam tanah atau perut bumi, perairan, kandungan barang-barang atau makhluk hidup dalam suatu kawasan perairan maupun suatu kawasan atau wilayah udara tertentu.
- c) Jenis haknya, setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan dari hak tersebut, yang membedakan dengan hak lainnya.

²⁵ Maria Rita Ruwiatuti, Heer Fauzi, Dianto Bachriadi, *Penghancuran Hak masyarakat Adat Atas Tanah (system Penguasaan tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria)*, Konsorsium Pembaharuan Agraria bekerja sama dengan INPI-Pact, 1997, Hal 4

²⁶ Ibid, hal 5

Secara eksplisit sistem tenurial ini menegaskan bahwa lebih penting untuk mengetahui aspek penguasaan dari pada aspek pemilikan suatu sumber-sumber agraria yang menjadi suatu objek hak. Meskipun bukan berarti aspek kepemilikan sama sekali tidak penting untuk diperhatikan. Tetapi pada umumnya, perhatian pada aspek kepemilikan ini pun pada akhirnya lebih diarahkan untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan suatu sumber daya dengan penguasaan atau pola-pola hubungan yang terjadi antara aspek kepemilikan suatu objek dengan aspek penguasaan dari objek hukum tertentu²⁷

Mengungkap sistem tenurial biasanya dimulai dengan mengidentifikasi jenis-jenis hak yang terdapat pada setiap persil tanah atau area/kawasan tertentu kemudian sumber-sumber daya tertentu dan siapa yang dalam kenyataannya menggunakan sumber daya tersebut (*de jure* dan *de facto*). Hal pertama adalah hak untuk menggunakan yang menunjukan pada suatu kondisi *de jure*. Sedangkan kedua adalah pemakaian yang terjadi dalam prakteknya sehingga menunjukan kondisi *de jure* sekaligus *de facto*. Kondisi *de facto* ini sangat penting untuk diketahui karena dalam kehidupan sehari-hari pada suatu masyarakat, sering berlangsung kondisi *de facto* ini, seperti misalnya mengenai petani penggarap yang menggarap perkebunan atau suatu kawasan tertentu. Secara *de facto*-nya, petani penggarap menguasai lahan tersebut dengan cara menggarap lahan, tapi secara *de jure*-nya bahwa

²⁷ Loc Cit

kepemilikan atas lahan tersebut bukan milik penggarap, karena hak garap bukanlah suatu kepemilikan walaupun dapat dijadikan hak milik.

Konsepsi *Land tenure* mencakup kedudukan para petani penggarap terhadap lahan garapannya. Karena itu penelaahannya biasanya bertolak dari sistem yang berlaku yang mengatur kemungkinan penggunaan syarat-syarat untuk dapat menggarap tanah, bagi penggarapnya dan berapa lama penggarapan itu dapat berlansung

4.2.3 Prosedur yang ditempuh dalam penyelesaian Penguasaan tanah dalam kawasan Taman Nasional

Penegakkan hukum dalam Pengelolaan kawasan hutan merupakan persoalan yang cukup rumit karena berbagai sebab seperti luasnya Taman Nasional baik Taman Nasional Darat maupun Taman Nasional Laut yang luasnya mencapai 20 juta hektar.²⁸

Dari aspek kebijakan makro, faktor yang mempengaruhi persoalan penegakan hukum adalah kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang tidak konsisten, misalnya UU No 5 tahun 1990 dengan Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung serta PP no. 28 Tahun 1985 yang memiliki perbedaan, yakni yang satu melarang adanya kegiatan budidaya di kawasan Taman Nasional, sementara Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan yaitu SKB No 969. K/05/M/PE/1989-429/Kpts-II/1989 yang memperbolehkan adanya

²⁸ Sulaiman Sembiring, *Kajian Tentang Pedoman Penegakan Hukum Di kawasan Taman Nasional*, Dirjen Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan 2001 Hal 1

kegiatan pertambangan didalam kawasan konservasi termasuk Cagar Alam dan Taman Nasional.

Didalam kawasan Taman Nasional terdapat pertamina yang telah bermukim sejak tahun 1970-an dan tidak dipersoalkan, upaya-upaya penegakan hukum yang hanya ditujukan terhadap masyarakat saja tentu menjadi penegakan hukum yang diskriminatif tatkala keberadaan Pertamina sendiri tidak pernah dipersoalkan. Secara historis harus diakui bahwa terdapat masyarakat atau masyarakat adat yang telah hidup secara turun temurun yang menempati bagian dari berbagai kawasan Taman Nasional, sebelum Taman Nasional itu sendiri ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang terlarang untuk sejumlah aktivitas, termasuk didiami.

Persoalan yang sering muncul atas kepemilikan lahan didalam kawasan hutan tersebut adalah bahwa, Pertama masyarakat telah ada berada terlebih dahulu secara turun temurun pada suatu kawasan tersebut ditetapkan sebagai taman nasional yang berarti, dengan status kawasan sebagai taman nasional mereka harus keluar dari kawasan tersebut. Kedua, proses penetapan kawasan hutan sebagai taman nasional yang harus diakui menyebabkan adanya lahan masyarakat yang masuk menjadi bagian dari taman nasional.

Berdasarkan pemetaan konflik diatas, karena identifikasi suatu kasus yang muncul didalam kawasan taman nasional, serta upaya penyelesaiannya perlu dilakukan secara baik dan tepat, berdasarkan pendekatan-pendekatan yang bisa diterima oleh masyarakat. Disisi lain, dan ini yang paling

mendasar, haruslah melihat kriteria masyarakat yang berada/masuk kedalam kawasan Taman Nasional tersebut.

Menurut Sulaiman N Sembiring kelompok masyarakat yang masuk ke atau berada didalam Taman Nasional terdiri dari 4 kelompok yaitu :

1. Masyarakat adat, yakni masyarakat yang telah berada di dalam kawasan secara turun temurun sejak sebelum kawasan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional sampai sekarang. Terhadap kelompok masyarakat adat seperti ini pengembalian tanah atau hutan adat mereka adalah alternatif utama penyelesaian konflik.
2. Masyarakat pemilik, yakni kelompok masyarakat yang bukan masyarakat adat, tetapi memiliki lahan atau hutan sejak sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional. Alternatif penyelesaian sengketa terhadap kelompok ini juga adalah pengembalian tanah atau hutan milik mereka
3. Masyarakat pendatang, yakni kelompok masyarakat yang datang atau masuk kedalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan taman nasional. Alternatif penyelesaian sengketa adalah melakukan pendekatan, misalnya dengan menyediakan lahan pengganti untuk mereka. Pertimbangannya adalah pertimbangan kemanusiaan
4. Masyarakat yang ingin mencari keuntungan semata-mata dengan tidak memperhitungkan dampak yang mungkin muncul. Kelompok masyarakat ini bisa dikategorikan sebagai maling yang dapat dikenakan sanksi pidana.²⁹

Sedangkan didalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan penyelesaian sengketa kehutanan sebagai berikut :

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilah upaya penyelesaian sengketa kehutanan diluar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak mercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

²⁹ Ibid, hal 123

Penyelesaian sengketa tentang kehutanan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan diluar pengadilan dimaksud untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

4.2.4 Status Hukum lahan yang merupakan eks Taman Nasional Kerinci

Seblat

Pada awalnya status tanah yang merupakan lahan pertanian masyarakat di Kecamatan Gunung Raya semula adalah hutan, dimana pada tahun 1926 zaman pemerintahan Kolonial Belanda pada waktu itu melakukan survey di daerah Lempur Kecamatan Gunung Raya yang terkenal dengan daerah yang begitu subur untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan teh, tetapi keinginan pemerintahan Belanda tersebut mendapat tantangan dari tokoh-tokoh adat di Lempur yang tidak mengizinkan pemerintahan Belanda untuk menjadikan hutan tersebut sebagai perkebunan teh, alasan tokoh-tokoh adat pada waktu itu melarang keinginan pemerintah Belanda adalah karena hutan tersebut merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi Lempur dan merupakan hulu sungai yang mengalir ke Desa Lempur yang mengairi sawah-sawah yang berada di Lempur serta hutan tersebut merupakan daerah tangkapan air untuk mencegah terjadinya bencana banjir.

Kemudian tokoh-tokoh adat pada tahun 1926 mengirimkan surat keberatan atas maksud pemerintahan Belanda kepada Gubernur Jenderal untuk membatalkan keinginan pemerintah Belanda tersebut, keberatan

tokoh-tokoh adat lempur pada waktu itu mendapat tanggapan dari Gubernur Jenderal yang mana dalam hal ini pemerintah Belanda mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh adat lempur yang menghasilkan sebuah keputusan bahwa pemerintah Belanda harus memindahkan lokasi perkebunan teh kedaerah lain maka pada waktu itu pemerintah Belanda memindahkan lokasi perkebunan teh kedaerah Kebun Baru kemudian pindah lagi kedaerah Kecamatan Gunung Kerinci yang mana perkebunan teh tersebut sampai sekarang masih ada yang dikenal dengan perkebunan teh Kayu Aro Kerinci.

Selanjut oleh pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1927 yang mana hutan yang akan dijadikan perkebunan teh tersebut mendapat tantangan dari pemuka adat maka pemerintah Belanda menetapkan lahan tersebut sebagai hutan lindung tetapi permasalahannya pemerintah Kolonial Belanda waktu itu bukan saja menetapkan daerah yang semula untuk dijadikan daerah perkebunan teh sebagai hutan lindung, tetapi hutan yang lebih cocok sebagai lahan pertanianpun dijadikan sebagai Hutan Lindung atau dikenal sebagai *Bos Weiswen (BW)* yang ditetapkan oleh pemerintahan Kolonial Belanda pada dekade 1926-1929 berdasarkan Besluit Pemerintah kolonial Belanda Nomor 44 tanggal 29 juni 1926 dan Nomor 27 tertanggal 9 desember 1929 Penetapan daerah ini bertujuan untuk melindungi daerah tangkapan air³⁰

³⁰ Abasri Razak, *Imbo Ulu Ayik Lmpow (Hutan Hulu Air Lekuk 50 Tumbi Lemur)*, Lembaga Kerja Tetap Daerah Hulu Air Lempur, 1996

Pada pertengahan tahun 40-an karena semakin bertambahnya penduduk di daerah alam lekuk 50 Tumbi Lempur yang mana lahan pertanian yang telah ada tidak mencukupi lagi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, maka pada waktu itu atas inisiatif masyarakat dengan persetujuan tokoh-tokoh adat yang lebih dikenal dengan istilah tanah Ajum Arah¹ untuk mencari lahan pertanian yang baru agar semua masyarakat bisa mendapatkan lahan pertanian serta dapat meningkatkan taraf hidup mereka hal ini sesuai dengan apa yang yang dicita-citakan oleh UUPA.

Setelah secara turun temurun masyarakat dalam hal ini petani penggarap menguasai dan mengerjakan lahan yang semula hutan lindung pada zaman pemerintahan Belanda tersebut untuk dijadikan lahan pertanian. Permasalahan timbul pada awal tahun 1982 karena lahan yang telah dikuasai masyarakat tersebut berubah status menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat melalui surat pernyataan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.736/Mentan/X/1982 dengan luas 1.484.650 Ha, yang mana lahan pertanian masyarakat tersebut termasuk bagian dari TNKS..

Dengan ditetapkan kawasan hutan TNKS di Kab. Kerinci sebagai kawasan konservasi telah mempersempit akses masyarakat disekitar kawasan hutan terhadap sumber daya yang ada didalamnya terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dan hak atas tanah yang telah lama dikuasai oleh masyarakat sehingga menimbulkan reaksi masyarakat di desa-desa perbatasan mengenai penetapan tapal batas TNKS. Hal yang menjadi persoalan adalah terjadinya perbenturan dan konflik sosial

antara kepentingan untuk konservasi yang ingin dijalankan pemerintah dengan masyarakat yang ingin agar kesempatan mereka untuk mengelola sumber daya hutan (SDH) dan adanya penentuan tapal batas yang jelas kawasan konservasi.

Menanggapi keresahan di masyarakat tersebut maka pemerintah pada waktu itu melakukan peninjauan kembali terhadap tata batas serta menelaah peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH) atau Tata Guna Hutan di masing-masing Propinsi yang daerahnya termasuk dalam wilayah TNKS yang telah di syahkan oleh Menteri Kehutanan, semua Propinsi tersebut mengusulkan dalam bentuk trayek Batas yang berbeda dengan surat Pernyataan Menteri Pertanian No 736/Mentan/X/1982, tanggal 14 Oktober 1982 hasil telaahan tersebut merupakan hasil kesepakatan ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Tingkat I yang merupakan usulan Trayek Batas Kesepakatan TNKS. Usulan dari tiap propinsi dalam bentuk trayek batas di bahas pada rapat kordinasi TNKS di Padang, Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 28-31 juli 1992.³¹

Menanggapi usulan dari masing-masing propinsi tersebut hasil Rapat Kordinasi di Padang maka Pemerintah pusat (Bappenas, Departemen Kehutanan) melakukan pembahasan Trayek Batas TNKS di Bappenas, tanggal 20 Agustus 1992 yang menghasilkan Trayek Batas yang disepakati (tata batas sementara), yang di tindak lanjuti dengan pemancangan batas sementara. Pemancangan trayek batas yang disepakati (sementara) tersebut

³¹ Buletin triwulan Taman Nasional Kerinci Seblat, Edisi 3 1999/2000, hlm 7

dilapangan dilaksanakan oleh Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan bersama dengan Pemda setempat dengan melibatkan masyarakat yang berada disekitar trayek batas TNKS.

Setelah melalui kajian dan proses tata batas dan pengkajian nilai –nilai baik fisik maupun kajian potensi alam, Sosial, budaya dan kajian ekonomi kemasyarakatan sejak tahun 1992 dengan melibatkan para ahli dari lembaga ilmiah pada bidang masing-masing maka hutan lindung pada zaman Pemerintah Kolonial Belanda di daerah Kabupaten Kerinci berdasarkan SK Menteri Kehutanan th 1982 tersebut sebagiannya dikeluarkan dari TNKS berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 192/Kpts-II/1996 yang menetapkan luas TNKS 1.368.000 Ha.

Lahan pertanian masyarakat yang dikeluarkan dari TNKS yang berada di wilayah Propinsi Jambi (semuanya berada daerah Kab Kerinci) tersebut berubah statusnya menjadi Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M) yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah TK II Kab. Kerinci yang luas 30.490 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 421/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Jambi

Setelah diadakan penataan batas, TNKS secara resmi menetapkan batas definitif oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan Surat Keputusan No 901/Kpts-II/1999 pada tanggal 14 oktober 1999 dengan luas 1.375.867. Karena itu TNKS merupakan taman nasional pertama di Indonesia yang telah menyelesaikan semua prosedur hukum hingga

memperoleh Batas Definitif (tetap). Batas Definitif tersebut adalah batas TNKS yang ada sekarang, yang merupakan kesepakatan masyarakat, Pemerintah Daerah Tk 1 dan Tk II yang harus dipatuhi dan dihargai oleh semua pihak, karena sudah memiliki azas legalitas dan memiliki aspek hukum positif.

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai kawasan konservasi terluas di Sumatera dan sebagai kawasan konservasi terluas kedua di Indonesia (yang pertama Lorenz di Propinsi Irian Jaya), telah memperoleh penetapan negara penuh ("*gazzettment*" Status) sejak keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut.

Arti penting dari penetapan negara penuh ini adalah batas TNKS telah selesai ditandai, dipetakan dan disahkan suatu langkah yang memberi kewenangan kepada Otoritas setempat untuk bertindak lebih baik didalam penegakan hukum dan melindungi wilayah TNKS dari perambahan dan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh para penebang pohon, penebangan liar, pemburu liar, perambahan serta yang merusak keutuhan kawasan hutan tersebut.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pelestarian dan Konservasi Alam Dephutbun, Bapak Widodo Ramono "Dengan pengukuhan TNKS, Taman Nasional pertama di Indonesia yang ditetapkan secara penuh, pengelola TNKS untuk pertama kali akan memiliki kewenangan secara resmi untuk

menindak secara hukum anggota masyarakat yang merambah sumber daya taman tersebut.³²

Setelah kegiatan penetapan kawasan hutan dilaksanakan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-II/1999, maka status hukum lahan pertanian masyarakat tersebut menjadi Kawasan Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M).

Perubahan status kawasan hutan merupakan kewenangan dari menteri kehutanan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dimana menteri Kehutanan berdasarkan pemberian wewenang dari Negara, berwenang untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai kawasan hutan.

Didalam menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan sebagai kawasan hutan dilakukan suatu kegiatan yang biasa dikenal dengan “pengukuhan kawasan hutan “ adalah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status batas kawasan hutan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang kriteria dan standar Pengukuhan Kawasan Hutan menyebutkan :

Pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui proses penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

³² Buletin Triwulan TNKS, *Haripulia*, edisi III th 1999/2000, hlm 11

Tujuan dari pengukuhan kawasan hutan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai status, batas dan luas wilayah yang bukan kawasan hutan.

Apabila suatu kawasan yang bukan hutan telah ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka hak atas tanah yang ada di atasnya dilepaskan. Dengan demikian kawasan tersebut berada dibawah kewenangan pengelolaan Departemen Kehutanan (dalam hal ini Balai Taman Nasional Kerinci Seblat).

Selain kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan dalam Pasal 5, ayat (2) Kepmenhut No 32/2001 dilaksanakan, penunjukan kawasan hutan harus pula didasarkan atas usulan dari Pemerintah Daerah atau DPRD setempat berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) Propinsi dan atau Rencana tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten dan nama kelompok hutannya sebagai mana yang disebut dalam Pasal 11 ayat 9) Kepmenhut tersebut.

Agar status kawasan hutan jelas batas-batasnya maka dilakukan kegiatan penataan batas yang berguna untuk mengetahui batas-batas kawasan hutan. Adapun kegiatannya meliputi kegiatan proyeksi batas, pemancangan letak batas, pengukuran dan pemetaan, termasuk pemasangan pal batas. Terakhir dari kegiatan tersebut adalah pembuatan berita acara tata batas.

Pembuatan BATB merupakan salah satu dasar penunjukan dan penetapan kawasan hutan Negara oleh pemerintah melalui Menteri

Kehutanan, bahwa suatu tanah yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan negara, sebelumnya harus dibuat terlebih dahulu BATB, yang dibuat dan diketuai oleh Bupati/ Walikota setempat dan anggotanya terdiri dari dinas instansi terkait yang berada ditempat tersebut dan salah satunya adalah Badan Pertanahan Negara (BPN), dinas kehutanan setempat atau unit pelaksanaan teknis setempat. Selanjutnya BATB jika sudah selesai dibuat dan ditandatangani oleh ketua dan anggotanya, disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan produksi akhir sertifikasi terhadap kawasan hutan tetap.

4.2.5 Dasar Penguasaan Hak Atas Tanah oleh Petani Penggarap terhadap tanah garapannya

Penguasaan oleh petani penggarap terhadap kawasan hutan lindung berawal dari pertengahan tahun 40-an dan hal ini terus berlanjut sampai dengan pertengahan tahun 1970-an, ketika masyarakat membutuhkan lahan pertanian yang mana lahan yang ada pada saat itu tidak mencukupi lagi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk

Tanah yang digunakan dan diusahakan oleh masyarakat (petani penggarap) tersebut berasal dari tanah hutan yang dibuka atas izin Depati melalui Ninik Mamak Dusun sebagai pemimpin adat yang dikenal dengan istilah tanah ajum arah, dengan ketentuan harus membayar iuran adat yang dibayar tiap tahun. Iuran adat itu dibayar pada setiap diadakan Kenduri Sko (kenduri adat) yang besarnya tiap tahun berubah-ubah tergantung dengan

kesepakatan para tokoh-tokoh adat dengan pertimbangan-pertimbangan serta melihat keadaan ekonomi masyarakat pada saat itu, karena lahan tersebut diusahakan terus menerus, hutan tersebut telah menjadi ladang tanaman kayu manis (*casiavera*) yang produktif sebagai tanaman pavorit masyarakat yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. serta sebagian dari tanah itu tidak lagi dikuasai oleh pembuka hutan semula, tetapi telah dikuasai oleh pihak lain karena peralihan hak, baik karena warisan maupun dengan jual beli.

Untuk lebih jelasnya tentang cara memperoleh tanah pertanian oleh petani penggarap dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel IV
Cara Perolehan Tanah Oleh Petani Penggarap
Di Kecamatan Gunung Raya

No	Cara memperoleh tanah	Jumlah	%
1	Membuka hutan	17	34
2	Warisan	23	44
3	Jual beli	10	20
Jumlah		50	100

Sumber data : Penelitian di lapangan 2004

Dilihat dari tabel diatas, maka dapat dikemukakan bahwa petani penggarap yang berada di Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M) di Kecamatan Gunung Raya memperoleh lahan pertaniannya dengan memperoleh warisan dari orang tuanya yang mana orang tuanya tersebut memperolehnya lahan tersebut dengan cara membuka hutan. Hal

ini dilihat dari persentase cara perolehan petani penggarap memperoleh lahan pertaniannya bahwa dengan memperoleh warisan berada di urutan pertama. Kedua cara perolehannya adalah dengan membuka hutan yang mana hal tersebut atas persetujuan dari lembaga kerapatan adat. Sedangkan cara perolehan lahan pertanian ketiga adalah dengan cara jual beli yang dilakukan di depan Kepala Desa atau Lurah setempat. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dasar penguasaan lahan garapan yang digunakan sebagai dasar penguasaan adalah membuka hutan atas persetujuan lembaga adat.

Selanjutnya keterangan dari hasil wawancara dengan **Bapak Drs.Syukur Kelabrajo Gelar Depati Agung** sebagai Ketua Lembaga Kerapatan Adat Lekuk 50 tumbi Lempur : dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa *"tanah Ajum Arah itu dapat diberikan, apabila ada permintaan dari masyarakat persekutuan/masyarakat adat untuk membuka lahan baru yang dijadikan sebagai lahan persawahan maupun lahan pertanian dan Tanah ajum arah ini dapat pula dilakukan atas inisiatif dari depati-depati dan ninik mamak atas dasar pertimbangan apabila masyarakat adat setempat sangat membutuhkan lahan pertanian atau persawahan untuk membiayai hidup keluarganya sedangkan yang berhak mengajum arah adalah ninik mamak atas titah depati."*³³

Begitu pula Pendapat **Bapak Darman Johor. BcHk. Gelar Depati Pulang Jawa** yang mana beliau mengutarakan bahwa *"Ajum Arah merupakan*

³³ Wawancara Kepada Ketua lembaga Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur, Kerinci 2004

kewajiban depati-depati dan orang adat untuk membuka lahan pertanian baru terutama lahan yang akan dijadikan sawah dan ladang untuk menghindari jangan sampai masyarakat tidak memperoleh lahan pertanian sehingga mereka dapat membiayai ekonomi keluarganya serta untuk mengurangi pengangguran di daerah ini³⁴

Penggarapan ini dilakukan terus menerus dan secara turun temurun. Setelah lahan tersebut mengalami beberapa kali perubahan status yang semula hutan lindung zaman kolonial pemerintah belanda menjadi Taman nasional kerinci seblat pada tahun tahun 80-an kemudian berubah lagi pada tahun 1999 menjadi Hutan Produksi Pola Partipasi Masyarakat (HP3M)

Sekalipun perubahan status lahan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, namun kedudukan petani penggarap terhadap lahan garapannya yang telah digarap sejak status hutan lindung sampai status yang terakhir yaitu Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M) tetap terus berlanjut. penggarap tetap menggarap lahan tersebut karena mereka membuka hutan atas seizin para orang adat dan tetap membayar kontribusi dalam bentuk pembayaran iuran adat.. Keadaan ini terus berlangsung hingga lahan garapannya tersebut berubah status hingga sekarang.

Sekalipun pada saat ini, para penggarap secara de jure bukanlah pemilik dari lahan tersebut karena menggarap secara terus menerus, namun berdasarkan ketentuan tersebut, para petani penggarap tidak mempunyai hak untuk memiliki atas tanah garapannya, dan tanah ajum arah tidak dapat

³⁴ Wawancara kepada Depati Dalam Lembaga Kerapatan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur, Kerinci 2004

dijadikan dasar/alat bukti kepemilikan atas tanah garapan (hutan lindung) tersebut. Tanah ajum arah tersebut hanya memberikan bukti bahwa hubungan hukum yang terjadi antara petani penggarap dengan lembaga adat sebatas hubungan hak garap saja.

Kalau dilihat dari pengertian hak menurut Satjipto Raharjo, yang memandang hak sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut, dimana hak merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, maka tanah ajum arah yang diberikan oleh lembaga adat kepada petani penggarap merupakan dasar timbulnya hak garap bagi petani atas lahan garapannya. Oleh karena adanya ajum arah oleh para tokoh adat maka petani penggarap berani menggarap lahan pertaniannya.

Disamping pengertian menurut Satjipto Raharjo, menurut Ulpianus dan Vegtig hubungan hukum yang timbul dengan adanya hak tersebut dapat bersifat atau pun penguasaan. Dengan demikian, kedudukan petani penggarap terhadap tanah garapannya bukanlah sebagai pemilik oleh karena tidak mempunyai bukti surat kepemilikan atas lahan tersebut, tetapi terbatas hanya menguasai atas lahan tersebut yakni dimiliki oleh petani penggarap maka luas lahan tersebut adalah sejumlah patok yang dimiliki.

Dalam sistem penguasaan atau biasa dikenal dengan sistem tenurial, setiap hak mengandung tiga komponen yakni subjek, objek, jenis

haknya. Jenis haknya dimaksud bahwa setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan dari hak tersebut yang membedakannya dengan hak lainnya.³⁵

Bersumber dari hal-hal tersebut sebagai subjek dari hak garap adalah petani penggarap, objeknya adalah garapan dan jenis haknya adalah hak garap, dimana hak garap ini terbatas hanya penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan pada permukaan tanah saja.

Sekalipun demikian, dalam Pasal 4 ayat (1) jo ayat (2) UUPA dikatakan mengenai luas hak yang dimiliki/dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum dalam pemanfaatan, pengelolaan serta penggunaan atas permukaan bumi yang disebut tanah yakni tidak terbatas pada permukaan tanah saja tapi meliputi pula tubuh bumi yang ada dibawahnya, air, serta ruang angkasa, sepanjang pengelolaan pemanfaatan serta penggunaannya berhubungan langsung dengan penggunaan hak tersebut, namun ketentuan tersebut tidak terhadap hak garap. Hal ini disebabkan sekalipun penggarapan tersebut menimbulkan hak garap, namun hak garap tidak termasuk sebagai salah satu yang dimaksud dalam Pasal 16 UUPA yang secara limiatif disebutkan mengenai jenis-jenis hak yang dapat diberikan dan dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum.

Dalam beberapa kasus pertanahan, kebanyakan kasus yang ditemui adalah petani penggarap dilahan perkebunan atau kawasan hutan. Hal ini terutama disebabkan permasalahan yang menyangkut nasib mereka, menyangkut hak mereka untuk menggarap lahan pertanian sesuai dengan

³⁵ op cit hal 4

harkat mereka sebagai manusia, yaitu mempunyai tanah yang relatif cukup untuk kehidupan mereka. Akan tetapi tanah yang menjadi idaman mereka itu bukan menjadi hak milik mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, Pasal 3 jo Pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa penguasa daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah tersebut tetapi tetap memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya di daerah tempat letaknya kawasan hutan tersebut, bahwa terlebih dahulu harus musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Hal ini berarti bahwa didalam melakukan penyelesaian kasus seperti Kasus penguasaan tanah di Kecamatan Gunung Raya, tidak boleh dilupakan untuk memperhatikan kepentingan penduduk tempat letaknya kawasan hutan tersebut.

Pada prinsipnya apabila tanah tersebut menjadi tanah Negara, itu berarti atas tanah tersebut tidak terdapat sesuatu hak atas tanah apapun. Maka kembali pada hakekat dari Hak menguasai Negara, maka negara sebagai penguasa dari tanah dapat memberikan tanah tersebut kepada siapa saja. Sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan Umum II poin 2 UUPA bahwa kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai oleh seseorang dengan sesuatu hak dibatasi oleh dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk

menggunakan haknya maka sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut, sementara kekuasaan Negara terhadap tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman terhadap hal tersebut diatas maka Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya seperti hak milik bagi petani penggarap atas lahan yang telah digarapnya selama bertahun-tahun dan secara turun temurun.

Disamping itu, hal tersebut sesuai pula dengan makna yang terkandung dalam Pasal 9 ayat 2 UUPA bahwa tiap-tiap warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah atau memperoleh manfaat baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai-nya, maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah mengimbangi hingga pada akhirnya akan tercapailah suatu tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepantasnya-lah Pemerintah memberikan rasa keadilan bagi para petani penggarap yang tidak memiliki tanah agar kepadanya diberikan sesuatu hak atas tanah terhadap tanah garapannya. Tentunya hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang tersirat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan tanah tersebut sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara, maka Negara dapat memberikan kepada siapa saja yang membutuhkan atas tanah tersebut. Serta berdasarkan beberapa ketentuan peraturan dan kenyataan yang sebenarnya maka petani penggarap berhak atas tanah yang telah dikuasai oleh negara tersebut.

4.2.6 Prosedur yang ditempuh dalam penyelesaian masalah penguasaan atas tanah Negara oleh petani penggarap di Kecamatan Gunung Raya.

Permasalahan kawasan hutan, baik statusnya maupun persoalan tata batas dan manfaatnya secara langsung untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terus mengemuka dan tidak kunjung selesai. Bahkan di beberapa tempat konflik status kawasan hutan dengan kepentingan masyarakat secara factual menunjukkan eskalasi konflik yang meningkat dan makin mengkhawatirkan.

Di Kecamatan Gunung Raya permasalahan penguasaan kawasan hutan dan tata batas TNKS dengan lahan pertanian masyarakat telah diselesaikan dengan musyawarah atau diluar pengadilan yang melibatkan Lembaga Kerabatan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur serta Kepala Desa-Kepala Desa dan Lurah setempat. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Bersama Pemerintah Desa Lempur Mudik, Lempur Hilir, Desa

Baru Lempur dan Kelurahan Lempur Tengah tertanggal 8 juni 1993 tentang Pengukuhan Kawasan Lindung Daerah Hulu Air Lempur dan Pengaturan Kembali Tata Cara Penggunaannya untuk Perlindungan dan Pemanfaatan Berlanjut Sumber Daya Alam Desa dan Taman Nasional Kerinci Seblat yang telah dikuatkan Oleh Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuhan Batas Hulu Air Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur tertanggal 10 juni 1993 yang ditanda tangani oleh Camat Kecamatan Gunung Raya, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci, Kepala Resort TNKS Lempur, Pemuka masyarakat, Alim Ulama, Tokoh Adat dan Kepala Desa serta Lurah Kelurahan Lempur Tengah tentang penetapan pal batas TNKS.

Penyelesaiannya terdapat dua cara yakni pertama lahan pertanian masyarakat yang telah digarap bertahun tahun dan turun temurun sebagiannya dikeluarkan dari Taman Nasional Kerinci Seblat, yang kemudian lahan pertanian tersebut menjadi Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M) yang mana masyarakat diperbolehkan menggarap lahan tersebut dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

Penyelesaian kedua yaitu bahwa lahan pertanian masyarakat yang terdapat dalam wilayah TNKS dengan kemiringan dibawah 40 % serta yang masuk jauh kedalam kawasan hutan dipertahankan menjadi kawasan TNKS maka petani penggarap harus meninggalkan lahan pertanian tersebut.

Walaupun permasalahan tata batas TNKS telah selesai dilaksanakan tetapi masyarakat tidak mengetahui status tanahnya yang telah digarap tersebut menjadi Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M)

karena mereka tidak diberi penjelasan bahwa lahan tersebut telah berubah statusnya menjadi HP3M. HP3M adalah hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah (dinas kehutanan dan konservasi tanah) sebaliknya petani penggarap beranggapan dengan dikeluarkan lahan tersebut dari TNKS berarti telah menjadi hak milik mereka. Untuk lebih jelasnya tanggapan petani penggarap terhadap lahan yang mereka garap tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel V
Tanggapan Petani Penggarap Terhadap
Lahan yang Mereka Garap

No	Status tanah	Petani penggarap	%
1	Hak Milik	45	90
2	HP3M	3	6
3	TNKS	2	4
Jumlah		50	100

Sumber data : Penelitian dilapangan tahun 2004

Dilihat dari tabel tersebut diatas adalah bahwa petani penggarap masih beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah hak milik mereka yang diakui oleh orang adat setempat sebanyak 90 % hal ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi tentang status tanah tersebut kepada masyarakat oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah.

Hasil wawancara penelitian yang dilakukan penulis dengan petani penggarap yaitu saudara Andi yang mana beliau mengatakan bahwa mereka terpaksa mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai status tanah

mereka, hal ini disebabkan karena mereka tidak berani berhadapan dengan pemerintah apalagi dipanggil ke kantor polisi atau polisi kehutanan.³⁶

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Masri yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui status tanah yang telah mereka garap tersebut menjadi HP3M karena mereka tidak diberitahukan mengenai perubahan status tanah tersebut.³⁷

Dari penelitian yang dilakukan kepada petani penggarap di eks kawasan Taman Nasional, bahwa mereka tidak dilibatkan dalam penentuan status hukum tanah tersebut serta tidak adanya penjelasan serta tidak adanya sosialisasi dari pemerintah (Dinas Kehutanan) tentang status tanah yang mereka garap, petani penggarap beranggapan bahwa tanah yang dikuasai itu adalah hak milik mereka. Hal ini bisa menjadi masalah besar dikemudian hari apabila pemerintah tidak segera menjelaskan serta mensosialisasi status tanah tersebut kepada masyarakat.

³⁶ Hasil wawancara dengan petani penggarap tahun 2004

³⁷ Hasil wawancara dengan petani penggarap tahun 2004

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan baik penelitian lapangan (*field research*) maupun penelitian kepustakaan (*library research*), dapat disimpulkan :

- a. Bahwa status tanah yang telah digarap oleh petani penggarap eks Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Gunung Raya adalah Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M), dimana pengelolaan diberikan kepada pemerintah (Dinas kehutanan dan konservasi tanah) yang mana masyarakat diberi hak menggarap dengan waktu yang tidak ditentukan.
- b. Dasar penguasaan tanah garapan oleh petani penggarap adalah hak membuka hutan yang mana hak tersebut diakui oleh UUPA yaitu Pasal 16 dimana masyarakat boleh membuka hutan dengan seizin pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan, kemudian hak tersebut dapat diajukan sebagai hak milik kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam PMA No 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak pengelolaan.

- c. Prosedur yang ditempuh dalam penyelesaian penguasaan tanah di Kecamatan Gunung Raya adalah melalui musyawarah yang dilakukan diluar pengadilan.

5.2. Saran-saran

Adapun saran –saran yang ingin penulis kemukakan setelah melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun kepustakaan adalah :

- a. Perlunya perhatian bagi pemerintah untuk melahirkan suatu peraturan-peraturan yang memberikan suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi petani penggarap. Mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Perlunya direvisi beberapa peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Kehutanan agar dalam pengaturan berpijak atau berdasar pada Undang-undang Pokok Agraria, dimana berdasarkan hirarki perundang-undangan sifat dari UUK mengacu atau bertitik tolak dari apa yang diuraikan dalam UUPA sehingga masyarakat mendapat perlindungan dan kepastian hukum atas tanah garapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia (Seri Hukum Agraria)*, Alumni, Bandung, 1978
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Candra Pratama, Jakarta, 1996
- Alam Setia Zain, *Aspek-Pembinaan Kawasan Hutan Dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta 1997
- Konservas Hutan*, Rineka Cipta, 1997
- Hukum Pertanahan (Penyelesaian Hukum Hak Atas Tanah, Seri Hukum Pertanahan III)*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT. Raja Grafiika, Jakarta, 1999
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, edisi 1999
- Hukum Agraria Indonesi, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah UUPA (edisi Revisi)*, Alumni, Bandung, 1995
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Kamus Besar Indonesia edisi II, Balai Pustaka
- Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Karya Utama, Surabaya
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan (Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya)*, Gajah Mada University Press, 1991.

- Lexi J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosakarya, Bandung, 2000
- Mackinnon, J, Kathi Mackinnon, G. Child dan J Thorsell, *Pengelolaan Kawasan Yang di Lindungi di Daerah Tropika* (H.H.Amir, Penerjemah). Gadjah Mada University Press
- Moh Kosnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Air langga University Press, Surabaya, 1979
- Parlindungan,A.P, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju,1998
- Pendaftaran Tanah Di Indonesia*,CV, mandar Maju , Bandung, 1994
- Rasyid Yakin, *Menggali Adat Lama Pusaka Usang Di Sakti Alam Kerinci*, Penerbit Anda, Kerinci, 1986
- Sadu Wasistiono, *Esensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai)*, Algaprin Jatinangor, Sumedang 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Salim,H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* , Sinar grafika, Jakarta, 1997
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Safudin Azwar, *Metode penelitian.*,Pustaka Pelajar, 2001
- Sudaryo Soimin, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,Rineka Cipta1997
- Sumardi.S.m.Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Gajah Mada University Press. 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1984
- Sulaiman N Sembiring, *Kajian Tentang Pedoman Penegakan Hukum Di Kawasan Taman Nasional*, Direktorat Jenderal Perlindunganh Hutan Dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, 2001

Tri Widodo W. Utomo, *Hukum Pertanahan (Dalam Perspektif Otonomi Daerah)*,
Navila, Yogyakarta, Januari 2002

Team Leader Komponen A-ICDP, *Pelibatan Masyarakat dalam Penyelesaian
Masalah Batas dan Penyusunan Taman Nasional Kerinci Seblat, Park
Management Kerinci Seblat-Integrated conservation and Development
Project*, 2000

Undang-Undang

- I. Undang-Undang Dasar 1945 (sesuai dengan amandemen IV)
- II. TAP MPR RI NO.IX/MPR RI/ 2001
- ✓ III. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria
- IV. UU NO 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakiaan Tanah Tanap Seizin
Yang Berhak Atau Kuasanya
- V. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- VI. UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- VII. UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
Tahun 2000-2004
- VIII. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- IX. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
- X. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor
192/Kpts-II/1996 Tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan,
Menetapkan Luas Taman Nasional Kerinci seblat
- XI. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-

II/1999 Tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat

XII. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 421/Kpts-

II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan hutan di propinsi Jambi